

Total Banten

• li • bicara data, bicara fakta

Mengurai Benang Kusut Belanja Tenaga Ahli Rp55,47 Miliar Pemprov Banten

Dari angka puluhan miliar yang terus meningkat, rekrutmen yang dipertanyakan, dan mengakomodasi kelompok tertentu hingga temuan penggunaan satu rekening untuk beragam objek belanja

Memindahkan Sekolah Demi Lahan Parkir

Ambisi Budi Rustandi menata wajah pusat Kota Serang bergerak dari revitalisasi Alun-alun Rp48,5 miliar hingga rencana gedung parkir berbasis investasi. Di Jalan Juhdi, SMPN 4 kini masuk dalam opsi relokasi.



Ketika Angka Butuh Penjelasan

Angka tidak pernah berbicara sendiri. Di balik setiap angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat kebijakan, proses pengambilan keputusan, serta tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Karena itulah, ketika Total Banten menemukan alokasi Rp55,47 miliar dalam pos Belanja Jasa Tenaga Ahli Pemprov Banten Tahun Anggaran 2026, angka tersebut menjadi awal dari sebuah penelusuran.

Pada mulanya, perhatian tertuju pada besarnya nominal dan tren kenaikan anggaran belanja tenaga ahli dalam beberapa tahun terakhir. Namun penelusuran kemudian berkembang. Muncul sorotan mengenai urgensi penggunaan tenaga ahli, mekanisme rekrutmen, keterbukaan dokumen, hingga efektivitas penggunaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.

Kami tidak memulai rangkaian pemberitaan ini dengan kesimpulan. Kami memulainya dengan data. Dari data, kami meminta penjelasan. Dari penjelasan, muncul fakta-fakta baru yang kemudian kembali kami telusuri. Rangkaian liputan membawa kami kepada berbagai pihak, mulai dari pemerintah, DPRD, kalangan PPPK, mahasiswa, hingga perangkat daerah yang menggunakan anggaran tersebut.

Perjalanan penelusuran kemudian menemukan fakta bahwa angka Rp55,47 miliar yang tercatat dalam rekening Belanja Jasa Tenaga Ahli memiliki struktur penggunaan yang lebih kompleks. Sejumlah honorarium lembaga ternyata juga tercatat menggunakan nomenklatur rekening yang sama. Atas temuan tersebut, BPKAD Provinsi Banten memberikan penjelasan mengenai dasar klasifikasi dan sistem penganggaran yang digunakan.

Penjelasan pemerintah menjadi bagian penting dalam keseluruhan pemberitaan. Sebab jurnalistik tidak berhenti ketika menemukan sebuah persoalan. Pers juga berkewajiban memberikan ruang kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan. Setiap perkembangan, klarifikasi, dan jawaban yang muncul kemudian harus ditempatkan sebagai bagian dari fakta yang utuh.

Namun perjalanan untuk mengurai angka Rp55,47 miliar juga memperlihatkan satu persoalan penting: transparansi anggaran tidak cukup hanya dengan membuka angka. Publik mungkin dapat melihat nilai anggaran dalam dokumen APBD, tetapi memahami apa yang berada di balik angka tersebut sering kali membutuhkan penelusuran lebih jauh.

Padahal, keterbukaan informasi idealnya tidak harus menunggu munculnya polemik. Ketika sebuah anggaran dialokasikan, publik seharusnya dapat memahami tujuan, dasar, dan struktur penggunaannya. Bukan karena setiap penggunaan anggaran harus dicurigai, tetapi justru karena keterbukaan merupakan cara terbaik untuk membangun kepercayaan.

Dalam isu ini, Total Banten tidak menempatkan diri sebagai hakim. Kami tidak memiliki kewenangan untuk menyimpulkan benar atau salahnya sebuah kebijakan secara hukum. Tugas jurnalistik adalah memeriksa data, menguji informasi, mendengar seluruh pihak, dan menyajikan fakta kepada publik secara proporsional.

Edisi ke-54 Majalah Total Banten hadir untuk merangkai seluruh kepingan informasi mengenai isu Belanja Jasa Tenaga Ahli Pemprov Banten. Dari temuan awal angka Rp55,47 miliar, sorotan berbagai pihak, penelusuran dokumen, hingga penjelasan terbaru pemerintah mengenai struktur penggunaan anggaran.

Pada akhirnya, isu ini mengingatkan kita bahwa APBD bukan sekadar deretan angka dalam dokumen. Setiap rupiah di dalamnya menyangkut kepentingan publik dan setiap kebijakan memiliki kewajiban untuk dapat dijelaskan. Karena ketika angka menyangkut uang rakyat, angka tidak cukup hanya dicatat. Tapi juga harus dijelaskan. Selain itu dalam edisi ini kami menghadirkan berbagai informasi menarik di Banten

Engkos Kosasih

Founder Total Banten

2

EDITORIAL;

- Angka Butuh Penjelasan

3-8

LAPORAN UTAMA;

- Angka Rp55,47 Miliar Memicu Sorotan

9

GARIS KEBIJAKAN;

- APBD Banten 2027 Jadi Rp9 Triliun Lebih

10

HUMANIORA;

- Pelaku Seni di Pandeglang Lawan Kepunahan

11

PEMBANGUNAN;

- Fiskal Terbatas, Pembangunan Tetap Prioritas

12

LEGISLATIF;

- DPRD Minta Pemerintah Segera Atasi Kekeringan

15-16

SOROTAN;

- Target Ambisus Budi Rustandi; Ruang Belajar Digeser Parkir

17/18

HUKRIM/POLITIK;

- Sabu dan Kekacauan Administrasi Desa
- WH Kembali Kuasai NasDem

19/21

PEMERINTAHAN;

- Sebar Diskon Pajak di HUT RI
- Tunjangan ASN Dipangkas
- Situ Rawa Enang dikuasai Swasta

21-26

ARUS UTAMA/WISATA;

- KUA PPAS Perubahan Belum
- Rabeg, Angeun Lada, hingga Tebing Koja

27/29

SISI KOTA/ESAI;

- Pemkot Tak Punya Kajian Cadangan Air
- Paradoks Banten; Industri Numpuk, Kemiskinan Tinggi, Fiskal Melemah

Angka Rp55,47 Miliar yang Memicu Sorotan

TOTAL BANTEN - Belanja Jasa Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp55,47 miliar. Anggaran tersebut tersebar dalam 184 paket pekerjaan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menjadi salah satu pos belanja yang mendapat sorotan sepanjang tahun ini.

Besarnya anggaran tersebut pertama kali terungkap dari penelusuran dokumen Penjabaran APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026. Dari dokumen itu, Belanja Jasa Tenaga Ahli tercatat digunakan untuk berbagai kebutuhan pada perangkat daerah dengan nilai yang berbeda-beda.

Berdasarkan data yang dihimpun, kebutuhan tenaga yang masuk dalam kelompok belanja tersebut mencapai sekitar 1.853 personel. Angka Rp55,47 miliar menjadi perhatian karena nilainya menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada APBD 2024, anggaran Belanja Jasa Tenaga Ahli tercatat berada di kisaran Rp38 miliar. Nilainya kemudian meningkat menjadi Rp52,38 miliar pada 2025 dan kembali naik menjadi Rp55,47 miliar dalam APBD 2026.

Dalam kurun waktu dua tahun, anggaran tersebut bertambah lebih dari Rp17 miliar. Kenaikan itu terjadi ketika nilai APBD Provinsi Banten secara keseluruhan justru mengalami penurunan. Pada 2024, APBD Banten tercatat sebesar Rp11,73 triliun. Setahun berikutnya turun menjadi Rp10,50 triliun dan kembali menyusut menjadi sekitar Rp10,27 triliun pada 2026.

Data tersebut kemudian menjadi dasar munculnya sorotan terhadap besarnya belanja jasa tenaga ahli di lingkungan Pemprov Banten. Terlebih, alokasi anggaran tersebut tidak terkonsentrasi pada satu bidang atau satu perangkat daerah.

Sekretariat DPRD Provinsi Banten menjadi salah satu OPD dengan alokasi terbesar. Anggaran Belanja Jasa Tenaga Ahli di lingkungan Setwan tercatat mencapai sekitar Rp19,294 miliar. Setelah itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten mengalokasikan sekitar Rp6,359 miliar.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tercatat memiliki alokasi sekitar Rp5,571 miliar. Sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menganggarkan sekitar Rp4,988 miliar.

Anggaran serupa juga tersebar di sejumlah perangkat daerah lainnya. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tercatat mengalokasikan sekitar Rp2,690 miliar. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2,392 miliar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sekitar Rp1,909 miliar. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp1,888 miliar, serta Dinas Kesehatan sekitar Rp1,702 miliar.

Sebaran anggaran tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Belanja Jasa Tenaga Ahli menjangkau berbagai sektor pemerintahan. Mulai dari kebutuhan di bidang teknologi informasi, pekerjaan teknis, konstruksi, pendampingan, asesor, hingga kebutuhan lain yang tercantum dalam program dan kegiatan perangkat daerah.

Namun, angka Rp55,47 miliar tersebut pada awalnya belum langsung memperoleh penjelasan rinci mengenai komponen belanja yang tercatat di dalamnya. Ketika dikonfirmasi mengenai besarnya anggaran tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Mahdani, mengaku masih melakukan pengecekan terhadap data yang ditemukan.

"Ini lagi saya cek dulu. Kok sampai Rp55 miliar, nanti saya cek dulu. Lagi dicek anak-anak," kata Mahdani saat dikonfirmasi TotalBanten. Pernyataan itu menjadi salah satu titik awal penelusuran lebih jauh terhadap struktur Belanja Jasa Tenaga Ahli Pemprov Banten.

Sebab, angka yang tercantum dalam dokumen APBD tersebut kemudian tidak hanya menjadi perhatian karena besarnya nominal, tetapi juga memunculkan sejumlah fakta lain dalam perkembangannya.

Sorotan terhadap anggaran tenaga ahli selanjutnya datang dari berbagai arah.

Sorotan PPPK

Temuan anggaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Pemprov Banten kemudian mendapat respons dari kalangan internal pemerintahan. Polemik tidak hanya berkembang mengenai besarnya anggaran, tetapi juga menyentuh persoalan pemanfaatan sumber daya manusia dan kesejahteraan pegawai yang selama ini bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi salah satu kelompok yang ikut menyoroti persoalan tersebut. Munculnya anggaran puluhan miliar rupiah untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli memunculkan perbandingan dengan kondisi penghasilan PPPK, terutama mereka yang selama ini masih memperjuangkan peningkatan kesejahteraan.

Salah seorang PPPK, Taufik, mengungkapkan penghasilan yang diterima pegawai PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Menurut dia, PPPK penuh waktu menerima gaji sekitar Rp3,5 juta. Setelah ditambah Tambahan Penghasilan Pegawai dan tunjangan lainnya, jumlah yang diterima berada di kisaran Rp4,2 juta.

Sementara PPPK paruh waktu menerima penghasilan yang lebih rendah dan tidak mendapatkan tunjangan seperti pegawai penuh waktu. "PPPK penuh waktu digaji sekitar Rp3,5 juta ditambah TPP Rp350 ribu dan tunjangan lain jadi total sekitar Rp4,2 juta. Kalau paruh waktu sekitar Rp2 juta lebih tanpa menerima tunjangan lagi," kata Taufik. Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi ironi ketika para pegawai masih menghadapi keterbatasan kesejahteraan.

Selama ini, kata Taufik, persoalan kemampuan keuangan daerah kerap menjadi alasan ketika PPPK menyampaikan aspirasi mengenai peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai.

"Harapan kami TPP jangan hanya Rp350 ribu. Selama ini alasannya tidak ada anggaran. Tapi faktanya anggaran untuk tenaga ahli mencapai Rp55 miliar. Mereka mah lebih sejahtera dari kita," ujarnya.

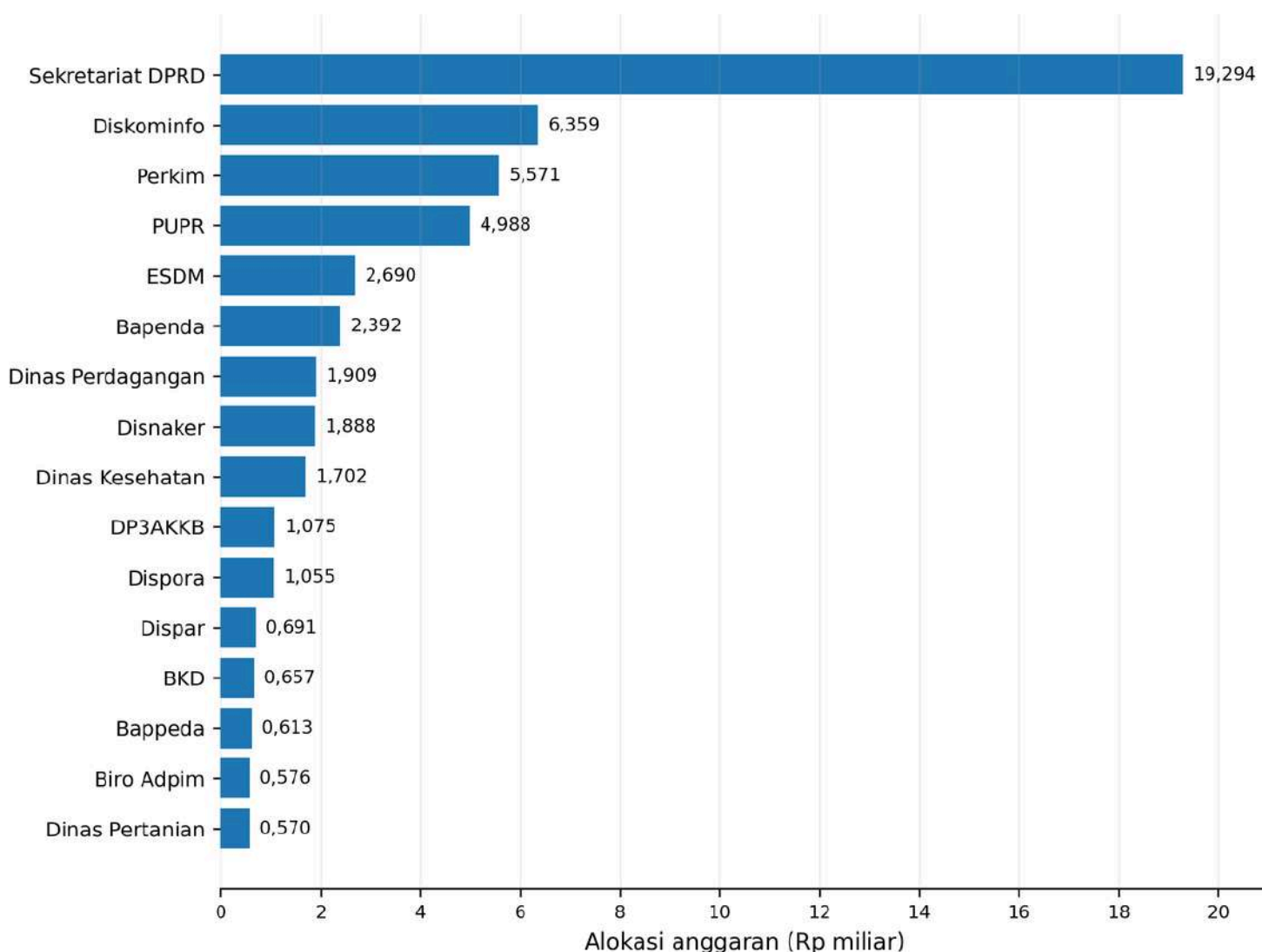
SEBARAN BELANJA JASA TENAGA AHLI PEMROV BANTEN DALAM APBD 2026

Total Rp55,47 miliar • 184 paket pekerjaan • sekitar 1.853 personel

Rp19,294

miliar

Sekretariat DPRD menjadi OPD dengan alokasi terbesar, jauh di atas perangkat daerah lainnya.



Catatan: Grafik menampilkan OPD dengan alokasi yang disebutkan dalam penelusuran Total Banten. Nilai dibulatkan dalam satuan miliar rupiah untuk kebutuhan visualisasi.

SUMBER: Dokumen APBD Banten 2026 | Penelusuran TotalBanten.com

Temuan BEM NUS dan Bungkamnya Gubernur Andra



Ilustrasi warga miskin di Banten. (Ist)

“Rekrutmen tenaga ahli tertutup, tidak ada satupun media sosial atau berita yang mengumumkan adanya rekrutmen tenaga ahli. Dan kami juga menemukan adanya pengkondisian atau indikasi kepentingan mengakomodasi tim-timnya Andra-DImyati saat Pilkada kemarin, dan itu sebagian menjadi tenaga ahli di sejumlah OPD,” kata Qolby.

Tidak ditemukannya informasi pembukaan rekrutmen kemudian menjadi dasar BEM Nus melakukan audiensi ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah. Mereka meminta penjelasan mengenai mekanisme pengadaan, dasar penentuan kebutuhan, kualifikasi serta proses pemilihan tenaga ahli yang bekerja di masing-masing OPD.

Dalam penelusurannya, BEM Nus menemukan bahwa mekanisme pengadaan tenaga ahli tidak seluruhnya dilakukan dengan pola yang sama. Sejumlah perangkat daerah memberikan penjelasan mengenai penggunaan sistem Katalog Elektronik dalam proses pengadaan. Namun, penjelasan tersebut belum serta-merta menjawab bagaimana calon tenaga ahli memperoleh kesempatan untuk masuk dalam proses pengadaan.

Persoalan tersebut menjadi perhatian karena proses melalui Katalog Elektronik berada pada tahap pengadaan setelah kebutuhan pekerjaan dan spesifikasi ditetapkan. Sementara informasi mengenai pembukaan kesempatan, kualifikasi tenaga, serta mekanisme penjangkaran calon tenaga ahli tetap menjadi bagian yang perlu dijelaskan kepada publik.

Qolby mengatakan BEM Nus tidak berhenti pada pertanyaan mengenai keberadaan tenaga ahli. Mereka menelusuri proses sejak kebutuhan tenaga tersebut direncanakan hingga seseorang akhirnya bekerja pada perangkat daerah.

“Kalau memang mekanismenya melalui Katalog Elektronik, kami ingin tahu proses sebelum itu bagaimana. Siapa yang menentukan kebutuhan, bagaimana kualifikasinya ditetapkan dan bagaimana orang-orang tersebut bisa masuk dalam proses itu,” katanya. Penelusuran tersebut kemudian membawa BEM Nus ke sejumlah OPD yang memiliki alokasi belanja jasa tenaga ahli. Dalam audiensi yang dilakukan, mahasiswa meminta data mengenai jumlah tenaga ahli, bidang pekerjaan, nilai anggaran dan mekanisme pengadaannya.

Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nus) Banten kemudian mulai melakukan penelusuran ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah. Fokusnya bukan lagi membandingkan besaran anggaran, melainkan mencari keterangan mengenai proses rekrutmen dan mekanisme pengadaan tenaga ahli.

Penelusuran BEM Nusantara Banten terhadap penggunaan anggaran Belanja Jasa Tenaga Ahli kemudian mengarah pada mekanisme rekrutmen. Organisasi mahasiswa tersebut mendapati proses pengadaan tenaga ahli di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tidak diumumkan secara terbuka kepada publik.

Koordinator Daerah BEM Nusantara Banten, M. Qolby Yusuf, mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap informasi pembukaan rekrutmen tenaga ahli. Namun, BEM Nus tidak menemukan pengumuman resmi mengenai kebutuhan tenaga ahli tersebut, baik melalui situs pemerintah, media massa maupun kanal media sosial resmi Pemerintah Provinsi Banten.

Namun, tidak seluruh permintaan informasi tersebut dapat langsung dijawab. Data mengenai identitas tenaga ahli, proses rekrutmen hingga hasil pekerjaan tidak tersedia secara utuh dalam dokumen APBD yang menjadi dasar awal penelusuran.

Dokumen anggaran hanya menunjukkan alokasi belanja berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan. Sementara informasi mengenai siapa tenaga ahli yang direkrut, bagaimana proses penunjukannya dan apa hasil pekerjaan yang telah dihasilkan membutuhkan penelusuran lebih lanjut kepada masing-masing perangkat daerah.

Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu pokok keberatan BEM Nus. Menurut mereka, besarnya penggunaan anggaran publik seharusnya diikuti dengan keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui proses dan hasil penggunaan anggaran tersebut. “Yang kami minta sebenarnya sederhana. Pemerintah harus membuka data. Siapa yang direkrut, apa keahliannya, bagaimana prosesnya dan apa hasil pekerjaannya. Karena ini menggunakan uang rakyat,” tegas Qolby.

Sorotan BEM Nus terhadap proses rekrutmen kemudian berkembang lebih jauh. Dalam penelusuran berikutnya, organisasi mahasiswa itu menemukan adanya informasi mengenai sejumlah tenaga ahli yang memiliki latar belakang kedekatan dengan lingkungan politik kepala daerah.

Informasi tersebut menjadi perhatian BEM Nus karena proses rekrutmen yang tidak terbuka membuat publik kesulitan menilai apakah penentuan tenaga ahli benar-benar dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kompetensi atau terdapat faktor lain di baliknya.

Namun, Qolby menegaskan kedekatan seseorang dengan kepala daerah maupun latar belakang politik tertentu tidak dengan sendirinya dapat dijadikan bukti adanya pelanggaran hukum. Dugaan mengenai adanya penyimpangan dalam proses pengadaan tetap harus dibuktikan melalui dokumen dan proses yang dapat diverifikasi.

Menurutnya, justru keterbukaan dokumen pengadaan menjadi penting untuk menguji seluruh informasi yang berkembang. Tanpa akses terhadap dokumen, publik tidak dapat mengetahui secara utuh tahapan pengadaan, pihak yang terlibat maupun dasar penentuan tenaga ahli.

“Karena itu dokumen pengadaan menjadi penting untuk menguji dugaan tersebut, terutama apabila terdapat bukti bahwa pihak tertentu telah ditentukan sebelum proses Katalog Elektronik berlangsung,” katanya.

Pernyataan tersebut menempatkan persoalan rekrutmen pada kebutuhan pembuktian. BEM Nus tidak hanya meminta penjelasan mengenai mekanisme pengadaan, tetapi juga mendorong dibukanya dokumen yang dapat menunjukkan seluruh tahapan penggunaan tenaga ahli.

Penelusuran yang dilakukan mahasiswa kemudian memperlihatkan persoalan lain. Keterbukaan mengenai anggaran belum diikuti dengan ketersediaan data rinci mengenai pelaksanaan pekerjaan. Nilai anggaran dapat ditemukan dalam dokumen APBD, tetapi informasi mengenai tenaga yang bekerja, proses pengadaannya, nilai kontrak dan hasil pekerjaan tidak seluruhnya tersedia dalam satu sistem informasi yang mudah diakses publik.

Kondisi tersebut membuat penelusuran Belanja Jasa Tenaga Ahli memasuki tahap berikutnya. Setelah persoalan besaran anggaran dan mekanisme rekrutmen, perhatian kemudian tertuju pada dokumen pengadaan dan hasil pekerjaan dari tenaga ahli yang dibiayai menggunakan APBD.

Dari sana, persoalan transparansi mulai menemukan titik yang lebih konkret: bukan hanya tentang bagaimana tenaga ahli direkrut, tetapi juga tentang sejauh mana publik dapat mengakses data untuk mengawasi penggunaan Rp55,47 miliar anggaran tersebut.

Di tengah berkembangnya sorotan terhadap belanja jasa tenaga ahli Pemerintah Provinsi Banten, Gubernur Banten Andra Soni tidak memberikan tanggapan saat dimintai penjelasan mengenai isu tersebut.

Seusai menghadiri kegiatan Pengukuhan BUMDes di Pendopo KP3B, Kota Serang, Kamis 23 Juli 2026, Andra Soni memilih meninggalkan lokasi tanpa menjawab pertanyaan wartawan yang meminta penjelasan mengenai dasar dan penggunaan anggaran Belanja Jasa Tenaga Ahli.

Sikap Gubernur tersebut terjadi ketika persoalan belanja tenaga ahli mulai menjadi perhatian publik. Penelusuran terhadap anggaran, mekanisme rekrutmen hingga penggunaan tenaga ahli di sejumlah OPD terus berkembang, sementara penjelasan langsung dari kepala daerah mengenai kebijakan tersebut belum diperoleh.

Di tengah minimnya penjelasan dari pucuk pimpinan Pemerintah Provinsi Banten, sorotan datang dari kalangan akademisi. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Ahmad Sururi, mengingatkan agar keberadaan tenaga ahli tidak dijadikan ruang untuk mengakomodasi kepentingan politik maupun kedekatan personal.

Menurut Ahmad Sururi, penggunaan tenaga ahli harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan terhadap kompetensi tertentu. Tenaga ahli harus memberikan nilai tambah terhadap kinerja pemerintahan melalui kapasitas dan keahlian yang dimiliki.

“Ini tidak dibenarkan. Tenaga ahli mesti memberikan nilai tambah karena punya

keahlian dan kompetensi, bukan karena faktor kedekatan dan kepentingan,” kata Ahmad Sururi kepada Total Banten, Rabu, 22 Juli 2026. Sururi menilai perdebatan mengenai belanja tenaga ahli tidak semestinya berhenti pada besarnya nominal anggaran. Yang harus diuji, menurut dia, adalah manfaat dari setiap anggaran yang dikeluarkan terhadap kinerja birokrasi dan pelayanan publik.

“Pertanyaannya bukan hanya mengapa belanja tenaga ahli naik di tengah tren APBD yang terus turun, tetapi juga apakah kenaikan belanja tenaga ahli menghasilkan peningkatan kualitas birokrasi, pelayanan publik, keberhasilan program, meningkatkan pendapatan daerah, atau mempercepat penyelesaian proyek-proyek strategis. Kalau tidak, maka perlu dievaluasi,” kata Sururi.



Pengamat Kebijakan Publik Untirta Banten, Ahmad Sururi. (Dok)

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan besarnya kebutuhan anggaran, tetapi harus mampu menunjukkan manfaat nyata dari keberadaan tenaga ahli terhadap kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“

Kalau memang mau naik belanja tenaga ahli ini, mesti dilihat kebutuhannya, kompetensinya, indikator kinerjanya jelas, targetnya jelas, hasil kerjanya terukur dan dapat dievaluasi gubernur,” pungkas Sururi.

Kata Pengguna Jasa Tenaga Ahli

Besarnya alokasi Belanja Jasa Tenaga Ahli pada sejumlah OPD Pemprov Banten kemudian dikonfirmasi kepada perangkat daerah penerima anggaran. Dua OPD dengan alokasi terbesar, Sekretariat DPRD Provinsi Banten dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, memiliki kebutuhan tenaga ahli dengan bidang pekerjaan berbeda.

Di Diskominfo Banten, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Beni Ismail mengatakan tenaga ahli telah digunakan sejak 2022. Pengadaannya dilakukan melalui mekanisme katalog elektronik.

"Prosesnya melalui katalog, dan tenaga ahli ini kita pakai sejak tahun 2022. Hanya memang ada yang tidak diperpanjang kontraknya, ada yang terus diperpanjang sampai sekarang," kata Beni.

Beni menjelaskan tenaga ahli Diskominfo digunakan untuk

mendukung sejumlah bidang, antara lain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), PPID, Satu Data Indonesia, Komisi Informasi, persandian, keamanan siber, pengelolaan server, infrastruktur jaringan, statistik sektoral, media pemerintah, programmer, desain grafis dan analisis informasi publik.

Menurut dia, tenaga ahli yang direkrut harus memenuhi kompetensi sesuai bidang pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan juga dilakukan melalui mekanisme pelaporan dan evaluasi.

"Rekrutmen harus bersertifikasi melalui e-Purchasing. Setiap bulan harus melaporkan pekerjaan dan dievaluasi," ujarnya.

Diskominfo Banten dalam APBD 2026 mengalokasikan sekitar Rp6,359 miliar untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan pekerjaan di sejumlah bidang teknis dan layanan pemerintahan berbasis digital.

Sementara alokasi terbesar Belanja Jasa Tenaga Ahli tercatat pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten dengan nilai sekitar Rp19,294 miliar. Nilai tersebut menjadikan Setwan sebagai OPD dengan anggaran Belanja Jasa Tenaga Ahli tertinggi di lingkungan Pemprov Banten.



Ilustrasi Tenaga Ahli

Besarnya anggaran di Setwan turut menjadi perhatian dalam penelusuran BEM Nusantara Banten. Sekretaris DPRD Provinsi Banten, Subhan, memberikan penjelasan mengenai penggunaan tenaga ahli di lingkungan Sekretariat DPRD dalam audiensi bersama mahasiswa.

Penggunaan tenaga ahli di lingkungan DPRD berkaitan dengan kebutuhan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD. Kebutuhan tersebut berbeda dengan tenaga ahli yang digunakan Diskominfo untuk pekerjaan teknologi informasi dan sistem digital.

Dengan demikian, dua OPD penerima anggaran terbesar tersebut memiliki karakter penggunaan tenaga ahli yang berbeda. Diskominfo menggunakan tenaga ahli pada bidang teknologi informasi, keamanan siber, statistik dan komunikasi publik. Sedangkan Sekretariat DPRD menggunakan tenaga pendukung sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan.

Namun, perbedaan bidang pekerjaan tersebut kemudian menjadi bagian dari persoalan yang lebih luas. Penelusuran dokumen APBD menunjukkan

nomenklatur Belanja Jasa Tenaga Ahli tidak hanya digunakan untuk tenaga dengan pekerjaan teknis seperti yang dijelaskan Diskominfo atau kebutuhan pendukung di lingkungan DPRD.

Pada sejumlah OPD lain, rekening 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli juga digunakan untuk objek belanja dengan karakter berbeda, termasuk kebutuhan BPSK, Komisi Informasi, LKS Tripartit, Dewan Pengupahan, asesor hingga kebutuhan teknis lainnya. Penggunaan satu rekening untuk beragam objek belanja tersebut kemudian menjadi fokus penelusuran berikutnya.



Pemprov Campur Aduk Rekening TA

Setelah menelusuri penggunaan anggaran tenaga ahli di sejumlah perangkat daerah, persoalan berikutnya muncul pada cara Pemerintah Provinsi Banten mencatat pengeluaran tersebut dalam struktur APBD. Satu kode rekening, 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli, digunakan untuk membiayai objek dengan karakter yang berbeda.

Dalam APBD Banten 2026, total anggaran yang tercatat dalam rekening tersebut mencapai sekitar Rp55,47 miliar. Namun, penelusuran Total Banten menemukan penggunaan rekening itu tidak terbatas pada tenaga ahli dalam pengertian pekerjaan berbasis keahlian tertentu.

Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten, sekitar Rp1,78 miliar digunakan untuk honorarium Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Di Diskominfo Banten, sekitar Rp2,4 miliar dialokasikan untuk kebutuhan Komisi Informasi.

Sementara di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, rekening yang sama digunakan untuk membiayai LKS Tripartit Rp570 juta, Dewan Pengupahan Rp510 juta, Asesor Pelatih BLKI Rp710 juta, Asesor LKP Rp68 juta hingga pemeliharaan server Rp28,844 juta. Di Dinas Kesehatan, sekitar Rp1,7 miliar juga tercatat dalam nomenklatur Belanja Jasa Tenaga Ahli untuk sejumlah kebutuhan, termasuk tenaga kesehatan dan tenaga ahli laboratorium.

Objek-objek tersebut memiliki fungsi yang berbeda. BPSK dan Komisi Informasi merupakan lembaga dengan dasar pembentukan dan struktur masing-masing. LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan merupakan bagian dari kelembagaan ketenagakerjaan. Asesor berkaitan dengan proses penilaian kompetensi. Sementara pemeliharaan server merupakan pekerjaan teknis teknologi informasi.

Seluruhnya tercatat dalam rekening yang sama.

Koordinator BEM Nusantara Banten, M Qolby Yusuf, mempertanyakan penerapan klasifikasi tersebut. Menurut dia, perbedaan karakter pekerjaan dan kelembagaan seharusnya dapat dijelaskan secara terbuka melalui dokumen penganggaran.

“Ruang lingkungannya berbeda. Belanja jasa tenaga ahli itu berkaitan dengan jasa keahlian tertentu, sementara BPSK, Komisi Informasi, LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan memiliki fungsi kelembagaan masing-masing. Asesor juga memiliki ruang lingkup pekerjaan tersendiri. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan dasar penggunaan satu rekening untuk kebutuhan dengan karakter yang berbeda,” kata Qolby.

Bagi BEM Nusantara, persoalannya bukan sekadar soal benar atau salah. Penjelasan mengenai klasifikasi belanja harus didukung dokumen yang menunjukkan penerima pembayaran, jenis pekerjaan, dasar pembayaran dan keluaran pekerjaan.

“Kami tidak sedang menyimpulkan benar atau salahnya sebelum dokumennya dibuka. Yang kami minta adalah transparansi. Kalau memang semuanya merupakan jasa tenaga ahli, jelaskan siapa tenaga ahlinya, apa keahliannya, apa pekerjaannya dan dasar pembayarannya. Kalau objeknya berbeda, pemerintah juga perlu menjelaskan dasar penggunaan rekening yang sama,” ujarnya.

Kepala BPKAD Banten Mahdani kemudian memberikan penjelasan atas penggunaan rekening tersebut. Ia mengakui honorarium sejumlah lembaga memang dianggarkan menggunakan rekening Belanja Jasa Tenaga Ahli.

Untuk BPSK, Mahdani mengatakan penggunaan rekening tersebut telah diterapkan sejak 2024. Penganggaran Tahun 2026, kata dia, mengacu pada Pergub Banten Nomor 23 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten. “Belanja tersebut benar dianggarkan pada belanja jasa tenaga ahli. Untuk TA 2026 berdasarkan Pergub Nomor 23 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten,” kata Mahdani dalam jawaban tertulis kepada Total Banten.

Mahdani membedakan dasar penetapan tarif dengan dasar penentuan kode rekening. Menurut dia, Standar Harga Satuan digunakan untuk kepentingan penetapan tarif, sementara nomenklatur rekening mengacu pada Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. “Untuk penentuan rekening acuannya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021,” ujar Mahdani.

“Pergub SHS berisikan standar tarif untuk kepentingan penganggaran belanja. Nomenklatur rekening berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021,” katanya.

Akademisi Universitas Banten Raya, Ari Supriadi menilai menilai pencampuran rekening tersebut menabrak asas akuntabilitas, transparansi, dan tata tertib anggaran. “Setiap belanja daerah wajib diletakkan pada nomenklatur yang spesifik berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019, kalau disatukan itu bentuk ketidakdisiplinan,” kata Ari.



Kepala BPKAD Banten, MAhdani

Gubernur Andra Soni: Pendapatan Menyusut Negara Kendaraan Listrik APBD BANTEN JADI Rp9 Triliun Lebih

TOTAL BANTEN - Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mengalami penyusutan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, pendapatan daerah Banten diproyeksikan sebesar Rp9,33 triliun. Angka tersebut turun sekitar Rp751,15 miliar dibandingkan APBD Banten 2026 yang mencapai Rp10,08 triliun.

Penyusutan terbesar berasal dari proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada APBD 2026, PAD Banten ditargetkan sebesar Rp7,49 triliun. Sementara dalam proyeksi APBD 2027, nilainya turun menjadi sekitar Rp6,77 triliun atau berkurang sekitar Rp725,60 miliar. Komponen terbesar PAD, yakni pajak daerah, turut mengalami penurunan signifikan. Target pajak daerah yang pada 2026 mencapai Rp6,81 triliun diproyeksikan turun menjadi Rp6,20 triliun pada 2027



Gubernur Banten, Andra Soni

Dengan demikian, terdapat penurunan sekitar Rp610,93 miliar. Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat relatif tidak mengalami perubahan signifikan. Dari sekitar Rp2,58 triliun pada 2026, proyeksinya menjadi Rp2,56 triliun pada 2027. Penurunan proyeksi pendapatan tersebut kemudian berpengaruh terhadap struktur belanja daerah.

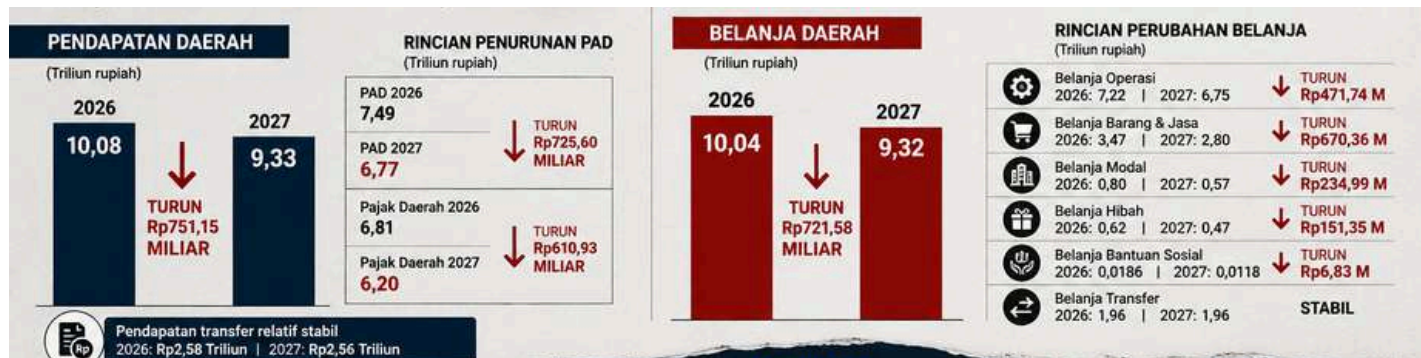
Total belanja daerah Banten pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp9,32 triliun. Jumlah tersebut turun sekitar Rp721,58 miliar dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp10,04 triliun. Belanja operasi diproyeksikan turun dari Rp7,22 triliun pada 2026 menjadi Rp6,75 triliun pada 2027. Penurunan cukup besar juga terjadi pada belanja barang dan jasa. Pada APBD 2026, komponen tersebut mencapai Rp3,47 triliun. Sementara dalam proyeksi 2027 nilainya menjadi Rp2,80 triliun atau berkurang sekitar Rp670,36 miliar.

Belanja modal turut mengalami penyusutan dari Rp804,09 miliar pada 2026 menjadi Rp569,10 miliar pada 2027. Artinya, terdapat pengurangan sekitar Rp234,99 miliar. Penurunan belanja modal antara lain terlihat pada pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, serta belanja jalan, jaringan dan irigasi. Belanja hibah juga diproyeksikan turun dari sekitar Rp620,75 miliar menjadi Rp469,40 miliar. Sementara belanja bantuan sosial turun dari Rp18,61 miliar menjadi Rp11,78 miliar.

Di tengah penyusutan sejumlah kelompok belanja tersebut, belanja transfer relatif stabil. Pada 2027, belanja transfer diproyeksikan sebesar Rp1,96 triliun atau tidak jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Gubernur Banten Andra Soni mengakui adanya kontraksi dalam proyeksi APBD Banten 2027. Menurut dia, penurunan tersebut tidak hanya terjadi di Banten, tetapi juga dialami sejumlah daerah lain. "Tahun 2027 dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS kita mengalami penurunan dari Rp10,5 triliun menjadi Rp9 sekian triliun. Nah, kontraksi ini hampir semua daerah," kata Andra Soni di Tansel usai acara Cek Kesehatan Gratis.

Andra menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi proyeksi pendapatan daerah adalah perubahan pada sektor kendaraan bermotor. Selama ini, salah satu sumber utama PAD Banten berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB. Namun, meningkatnya penggunaan kendaraan listrik dinilai berpengaruh terhadap proyeksi penerimaan pajak daerah. "Pendapatan utama kita kan sebenarnya dari pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB. Nah, tingkat pembelian kendaraan bermotor kita sekarang banyak yang listrik. Sedangkan listrik, pemerintah pusat ada insentif khusus sehingga tidak mempengaruhi pendapatan," ujarnya.

Data KUA PPAS BANTEN 2027





Komunitas Info Bercanda

Lawan Kepunahan Seni di Pandeglang

TOTAL BANTEN - Kesenian Ubrug mulai terpinggirkan di tengah perkembangan zaman. Kondisi tersebut mendorong Komunitas Info Bercanda dari Padepokan Maung Pande untuk terus mengenalkan seni tradisional khas Banten tersebut kepada masyarakat.

Upaya pelestarian dilakukan dengan menggelar pertunjukan Teater Ubrug dari kampung ke kampung di Kabupaten Pandeglang. Kegiatan ini menjadi salah satu cara komunitas tersebut melawan ancaman kepunahan kesenian tradisional Ubrug.

Pertunjukan digelar di dua lokasi, yakni Kampung Cimalati, Desa Pasir Eurih, serta Kampung/Desa Cigandeng, Kabupaten Pandeglang. Selain sebagai sarana sosialisasi seni Ubrug, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pimpinan Padepokan Maung Pande, Surya Galung, mengatakan kesenian Ubrug saat ini masih kurang dikenal, terutama di kalangan generasi muda. Karena itu, pertunjukan dari kampung ke kampung dinilai penting untuk memperkenalkan kembali seni tradisional tersebut kepada masyarakat. "Pertunjukan tradisional Ubrug saat ini kurang banyak dikenal di kalangan anak muda. Oleh karena itu, kegiatan ini untuk menyosialisasikan kesenian Ubrug kepada masyarakat Pandeglang sebagai upaya nyata pelestarian budaya lokal di tengah ancaman kepunahan," kata Surya.

Menurutnya, keterbatasan panggung dan fasilitas tidak menyurutkan semangat para pemain untuk terus mementaskan Ubrug. Pertunjukan bahkan tetap digelar di panggung sederhana yang berada di tengah permukiman warga.

Surya menjelaskan, Ubrug bukan sekadar pertunjukan hiburan. Kesenian tersebut memadukan sejumlah unsur seni tradisional, seperti tari, silat, debus dan musik tradisional yang dikemas dalam lakon-lakon jenaka khas Ubrug.

"Sebenarnya Ubrug ini bukan sekadar tontonan, tetapi ini adalah kesenian orang Banten, khususnya Pandeglang. Bisa jadi ini jati diri orang Pandeglang. Oleh karena itu, kami berharap bisa dikenal oleh generasi muda sekarang agar kesenian ini tidak punah," ujarnya.

Sementara itu, Aria, salah seorang pemain musik Ubrug, mengatakan pertunjukan tersebut selain menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kesenian tradisional asli Banten.

Menurut dia, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Ubrug menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keberlangsungan kesenian tersebut. "Kami berharap ke depan ada tempat untuk menampilkan kesenian-kesenian tradisional asli Pandeglang supaya anak-anak muda juga bisa tertarik dengan kesenian ini," tegasnya.

Antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang menyaksikan pertunjukan. Asep, salah seorang penonton, mengaku tertarik karena pertunjukan Ubrug menampilkan berbagai unsur seni, mulai dari silat, tari hingga debus.

Ia bahkan mengaku baru mengetahui kesenian tersebut setelah menyaksikan pertunjukan secara langsung.

"Saya rasa ini perlu dikembangkan agar ke depan generasi muda bisa tahu, bahkan berminat untuk belajar," katanya.



Fiskal Terbatas Infrastruktur Prioritas

Bupati Pandeglang: Kami Terus Berupaya!

TOTAL BANTEN - Keterbatasan fiskal daerah tidak menghentikan langkah Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam menjalankan agenda pembangunan. Di tengah keterbatasan kemampuan anggaran, Pemkab Pandeglang terus mencari berbagai strategi untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur dasar. Pembangunan jalan menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang memandang infrastruktur jalan sebagai urat nadi pembangunan yang memiliki peran penting dalam membuka akses masyarakat, memperlancar mobilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat menjadi salah satu strategi yang terus diperkuat.

Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani mengatakan pembangunan dan kemajuan daerah tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas serta sinergi seluruh pemangku kepentingan. Hal itu disampaikan Dewi saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

"Kami terus berupaya membangun sinergitas dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, TNI/Polri, serta lembaga lainnya," kata Dewi

Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten mulai menghasilkan sejumlah pembangunan infrastruktur. Melalui dukungan program pembangunan jalan, sepanjang 2025 hingga 2026 tercatat sebanyak 16 ruas jalan dengan total panjang mencapai 42,4 kilometer dibangun di Kabupaten Pandeglang.

Pada 2025, pembangunan melalui Program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra dilakukan pada delapan ruas jalan dengan total panjang 23,5 kilometer. Sementara pada 2026, pembangunan kembali dilanjutkan pada delapan ruas jalan lainnya dengan panjang mencapai 18,9 kilometer.

Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas antarwilayah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan yang layak. Kolaborasi lintas pemerintahan juga membuka peluang masuknya program pembangunan dari pemerintah pusat.



Ilustrasi; Perceraian di Banten. (Dok)

Salah satunya melalui program Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah atau IJD. Melalui program tersebut, pembangunan ruas Jalan Sukawaris-Tanjungan di Kecamatan Cikeusik mulai direalisasikan. Jalan sepanjang 4,5 kilometer dengan lebar 5,5 meter itu dibangun dengan nilai anggaran sekitar Rp26,98 miliar.

Pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas masyarakat sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi warga di wilayah selatan Pandeglang. Bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang, pembangunan infrastruktur tidak semata-mata diukur dari panjang jalan yang berhasil dibangun. Infrastruktur menjadi bagian dari upaya yang lebih besar untuk membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kolaborasi dengan pemerintah pusat juga dilakukan dalam pembangunan sektor pendidikan. Salah satunya melalui pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari. Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus menjadi salah satu upaya menekan angka putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.

Bupati Dewi menegaskan bahwa arah pembangunan daerah pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. "Pembangunan yang pada akhirnya adalah pembangunan manusia. Tidak hanya diukur dari berapa panjang jalan dibangun, berapa banyak sekolah dibangun, dan lebih mengarah kepada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM," pungkasnya. (ADV)





DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

17 AGUSTUS 1945 - 17 AGUSTUS 2026

INDONESIA BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR



H. TB. A. KHATIBUL UMAM, M.Pd
KETUA DPRD

FIKRI PEBRIANSYAH, S.Sos
WAKIL KETUA DPRD

M. DADI RAJADI, SE
WAKIL KETUA DPRD

MM. FUHAIRA AMIN, SE
WAKIL KETUA DPRD

H. MUSLIM TAUFIQ, S.Ag, M.Pd
PIH. SEKRETARIS DPRD

DPRD Minta Pemkab Gercep Tangani Kekeringan

TOTAL BANTEN - Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Tubagus Agus Khatibul Umam, mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang segera mempercepat penanganan terhadap warga yang hingga kini masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Desakan itu muncul setelah dampak kekeringan mulai dirasakan langsung masyarakat. Sejumlah warga dilaporkan terpaksa memanfaatkan sumber air yang tidak layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Kami minta BPBD segera bergerak, turun langsung, supaya masyarakat tidak terus mengalami kesulitan mendapatkan air bersih," ujar Agus, Minggu (30/8/2026).

Agus mengatakan persoalan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap air bersih. Kondisi tersebut mulai berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan ketika masyarakat terpaksa menggunakan air yang kualitasnya tidak layak. Karena itu, selain BPBD, Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang juga diminta melakukan pemeriksaan

terhadap warga yang dilaporkan mengalami gangguan kesehatan, termasuk penyakit kulit. "Nanti kami akan sampaikan kepada Dinkes Kabupaten Pandeglang supaya turun ke desa atau kampung yang masyarakatnya mengalami gatal-gatal. Kami minta BPBD dan Dinkes bekerja cepat untuk masyarakat," katanya.

Agus mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menunggu dampak kekeringan meluas. Menurut dia, munculnya gangguan kesehatan di tengah masyarakat harus menjadi indikator bahwa penanganan tidak cukup hanya dilakukan secara administratif. "Khawatir ada penyakit lain selain penyakit kulit yang muncul akibat kondisi kekeringan ini. Karena itu harus segera diantisipasi," tegasnya. Ia mengaku persoalan tersebut telah disampaikan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam pertemuan bersama Sekretaris Daerah dan instansi terkait.

Namun, Agus menilai penanganan kekeringan tidak bisa berhenti pada distribusi bantuan air bersih.

Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan langkah jangka panjang bagi wilayah yang setiap tahun berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan harus memiliki cadangan air yang dapat dimanfaatkan masyarakat ketika sumber air mulai menyusut.

Pembangunan sumur bor dan fasilitas penampungan air, menurut Agus, dapat menjadi salah satu alternatif yang perlu dipetakan berdasarkan tingkat kerawanan masing-masing wilayah. Meski demikian, ia mengakui pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Karena itu, pemerintah daerah harus menentukan prioritas berdasarkan wilayah yang memiliki dampak paling besar terhadap masyarakat. "Harus dilihat daerah mana saja yang ketika terjadi kekeringan dampaknya paling besar bagi masyarakat. Kalau sampai muncul penyakit kulit dan persoalan kesehatan lainnya, itu harus segera diantisipasi," pungkasnya.



DPRD KOTA SERANG

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA



17 AGUSTUS
1945

17 AGUSTUS
2026

**INDONESIA
BERDAULAT
ADIL DAN MAKMUR**



H. Muji Rohman, SH
Ketua DPRD Kota Serang

Roni Alfanto, SE
Wakil Ketua I

Hasan Basri, S.Ag
Wakil Ketua II

Muhammad Farhan Azis, Ak, M.Sc
Wakil Ketua III

Iman Setiawan, S.Sos, MM
Sekretaris DPRD
Kota Serang



DPRD BANTEN

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berakhlak Mulia, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan



Selamat Memperingati

Mäülid Nābi

Muhammad SAW

12 Rabiul Awal 1448 H



**H. IMRON
ROSADI, Lc.**
WAKIL KETUA DPRD

**YUDI BUDI
WIBOWO**
WAKIL KETUA DPRD

**H. FAHMI
HAKIM, S.E**
KETUA DPRD

**BARHUM
HS, S.IP., M.IP**
WAKIL KETUA DPRD

**H. EKO SUSILO,
S.E., M.Si**
WAKIL KETUA DPRD



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

f X @ dprdbanten Banten Parlemen TV setdprd.bantenprov.go.id dprd-bantenprov.go.id



CS Network

SOLUSI BISNIS DIGITAL

PEMBUATAN WEBSITE & PT PERORANGAN

**MURAH
3,5 JUTA**

Punya PT & Website
Belum dengan Pembukaan Faktur Pajak

Tingkatkan bisnis Anda dengan
legalitas dan website profesional



Contact us
087854473555



Visit Us
Csnetwork@gmail.com

Ruang Parkir Menggeser Ruang Belajar? Target Ambisius Budi Rustandi

Ambisi Budi Rustandi menata wajah pusat Kota Serang bergerak dari revitalisasi Alun-alun Rp48,5 miliar hingga rencana gedung parkir berbasis investasi. Di Jalan Juhdi, SMPN 4 kini masuk dalam opsi relokasi.



SMPN 4 Kota Serang. (Dok)

TOTAL BANTEN - Wali Kota Serang Budi Rustandi tengah mengejar agenda besar penataan pusat Kota Serang. Revitalisasi Alun-alun dengan anggaran sekitar Rp48,5 miliar menjadi salah satu proyek yang disiapkan. Bersamaan dengan itu, Pemerintah Kota Serang juga membuka peluang investasi puluhan miliar rupiah untuk membangun gedung parkir di kawasan pusat kota.

Rencana tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menata sejumlah kawasan strategis di Kota Serang. Namun, keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat Pemkot tidak seluruhnya mengandalkan pembiayaan pemerintah.

Untuk pembangunan gedung parkir, Budi memilih membuka ruang kerja sama dengan pihak ketiga. Salah satu skema yang sebelumnya disampaikan adalah Build Operate Transfer (BOT), yakni investor membangun dan mengoperasikan fasilitas dalam jangka waktu tertentu sebelum aset tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. "Masih dalam rapat pembahasan," kata Budi, Rabu (8/7/2026).

Melalui skema kerja sama tersebut, pembangunan fisik gedung dilakukan investor. Pemerintah daerah kemudian memperoleh manfaat dari kerja sama sesuai kesepakatan, sementara aset akan diserahkan setelah masa pengelolaan berakhir. "Jadi bangunan gedung parkir pihak ketiga yang membangun, nanti BOT lalu diserahkan ke kita. Jadi kita dapat PAD, dapat gedung juga nanti," kata Budi.

Rencana pembangunan gedung parkir kemudian berkembang dengan masuknya proposal investasi dari PT Brata Wiedjaya Banten. Perusahaan tersebut mengajukan rencana pembangunan dua gedung parkir di kawasan pusat Kota Serang dengan nilai investasi sekitar Rp38 miliar.

Dua lokasi yang diajukan berada di kawasan Pasar Lama dan Jalan Juhdi. Nilai investasi untuk lokasi Pasar Lama diperkirakan mencapai Rp17 miliar, sedangkan pembangunan di Jalan Juhdi sekitar Rp21 miliar. "Yang satu Rp17 miliar dan yang satunya lagi Rp21 miliar. Jadi Rp38 miliar dari total dua lokasi itu, Pasar Lama dan Jalan Juhdi," kata Ketua Satgas Percepatan Pembangunan dan Investasi Kota Serang, Wahyu Nurjamil Rabu (26/8/2026).

Menurut Wahyu, proposal tersebut masih harus dibahas bersama Sekretaris Daerah dan perangkat daerah terkait sebelum pemerintah mengambil keputusan. "Insyaallah nanti kami akan tindak lanjuti melalui rapat internal dengan Pak Sekda dan dinas terkait, berkaitan dengan mekanisme atas hasil permohonan yang disampaikan dari PT Brata Wiedjaya Banten," ujarnya.

Selain BOT, Pemkot Serang juga membuka pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan skema Bangun Guna Serah (BGS). Namun, hingga kini belum ada keputusan mengenai mekanisme final kerja sama investasi tersebut. Sekretaris Daerah Kota Serang Nanang Saefudin mengatakan konsep gedung yang direncanakan tidak hanya diperuntukkan sebagai fasilitas parkir. Pemerintah juga membuka kemungkinan adanya fasilitas pendukung untuk aktivitas masyarakat dan ekonomi.

"Bukan hanya parkir saja, di situ ada gerai-gerai misalnya ada pelaku UMKM, ada tempat pertemuan yang skala kecil dan mungkin paddle di situ," kata Nanang. **(Wan/Red)**



Sekda Kota Serang, Nanang Saepudin

Nanang mengatakan keterlibatan investor menjadi pilihan karena kemampuan APBD Kota Serang belum cukup untuk membangun fasilitas parkir dengan kebutuhan anggaran puluhan miliar rupiah. "Secara APBD kita belum mampu menyiapkan gedung-gedung parkir yang notabene dibangun puluhan miliar, sehingga kita bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam hal ini PT Brata Wiedjaya Banten," ujarnya.

Rencana pembangunan gedung parkir muncul bersamaan dengan agenda revitalisasi Alun-alun Kota Serang. Pemkot sebelumnya telah menyiapkan proyek revitalisasi dengan nilai anggaran sekitar Rp48,5 miliar. Penataan Alun-alun dan kawasan sekitarnya membuat persoalan fasilitas pendukung, termasuk parkir, menjadi bagian dari pembahasan pemerintah. Pemkot kemudian membuka peluang pembangunan fasilitas parkir melalui investasi swasta.

Dari dua lokasi yang diajukan investor, Jalan Juhdi menjadi titik yang kemudian memunculkan persoalan lain. Di kawasan tersebut berdiri SMP Negeri 4 Kota Serang.

Sekolah itu kini masuk dalam opsi relokasi yang disampaikan pemerintah daerah dalam pembahasan penataan kawasan.

Nanang mengatakan Pemkot Serang berencana memindahkan SMPN 4 ke gedung baru yang dinilai lebih representatif. Salah satu lokasi yang disebut sedang dipertimbangkan berada di wilayah Ciracas.

"Kita akan memindahkan SMP 4, kita akan pindahkan ke gedung baru yang lebih representatif, rencana sih baru ditetapkan di Ciracas," kata Nanang.

Namun, rencana tersebut belum menjadi keputusan final. Pemkot masih akan melakukan kajian bersama Dinas Pendidikan serta berkomunikasi dengan wali murid melalui komite sekolah. Menurut Nanang, terdapat sejumlah aspek yang harus diperhatikan sebelum kebijakan relokasi ditetapkan.

"Pertama adalah aspek hukum agar nanti kebijakan yang dibuat Pak Wali Kota dengan kita semua tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan," katanya.

Selain aspek hukum, pemerintah juga akan mempertimbangkan kondisi sosial di sekitar kawasan Jalan Juhdi.

"Kedua adalah aspek sosial, terutama di Jalan Juhdi, di situ kan sudah ada keramaian segala macam, apakah masih layak tidak anak-anak sekolah di situ," tambahnya.

Proposal investasi Rp38 miliar untuk dua gedung parkir belum menjadi proyek yang ditetapkan. Pemkot masih membahas mekanisme kerja sama, aspek teknis, tata ruang serta sejumlah ketentuan lain yang diperlukan.

Nanang juga menyebut nilai investasi yang diajukan masih berada pada tahap awal pembahasan.

"Adapun nilai investasi baru kita bicarakan, baru expose, masih ada perbaikan-perbaikan. Tapi tentu, di dalam kebijakan nanti yang akan dibuat oleh Pak Wali Kota ada beberapa aspek yang harus kita pertimbangkan," katanya.

Di sisi lain, rencana relokasi SMPN 4 juga belum menjadi kebijakan final. Pemerintah masih harus menyelesaikan kajian hukum, sosial, pendidikan serta komunikasi dengan pihak sekolah dan masyarakat.

Rencana relokasi SMPN 4 kemudian mendapat perhatian dari Tokoh Pendiri Provinsi Banten, KH Embay Mulya Sarief. Ia meminta Pemkot Serang mempertimbangkan rekam jejak sejarah kawasan tersebut sebelum mengambil keputusan.

Menurut Embay, lokasi yang kini digunakan sebagai SMPN 4 memiliki perjalanan sejarah sebelum difungsikan sebagai sekolah negeri. Kawasan tersebut disebut pernah menjadi Sekolah Chung Hua, kemudian digunakan sebagai markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPI) pada masa pergerakan 1966, hingga pernah menjadi gedung SMEP.

"Secara undang-undang, gedung itu memang bukan cagar budaya, saya menjadi saksi. Namun, tempat itu memiliki nilai sejarah tersendiri karena pernah dijadikan markas KAPI pada masa penumpasan G30S/PKI. Bisa dibilang itu semacam monumen pergerakan Angkatan '66," ujar Embay, Minggu (30/8/2026).

Embay mengatakan status bangunan yang bukan cagar budaya tidak menghilangkan rekam sejarah yang melekat pada kawasan tersebut. Karena itu, ia meminta pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan masa depan SMPN 4.

"Pemerintah harus bijak. Mana yang lebih utama harus dipertimbangkan. Kondisi di sana memang sudah sesak seperti halnya SMA Negeri 1, tetapi Pemkot harus benar-benar menimbang sisi sejarah dan aspirasi masyarakat," tegasnya. **(Wan/Red)**

SABU DAN KEKACAUAN ADMINISTRASI DESA

Seorang kepala desa diamankan dalam pengembangan kasus sabu, positif amfetamin dan menjalani rehabilitasi. Namun ketika kursi pemerintahan harus dijaga agar tidak kosong, birokrasi justru memunculkan perbedaan tafsir: PLT atau PLH? Kasus Undar Andir membuka persoalan yang lebih besar dari sekadar seorang pejabat desa yang tersandung narkoba.

TOTAL BANTEN - Jumat sore, 21 Agustus 2026, operasi narkoba Polda Banten bergerak dari Jalan Lingkar Selatan menuju Kramatwatu. Sebuah penangkapan yang semula membidik peredaran sabu kemudian berkembang ke arah yang tak biasa: menyeret nama seorang kepala desa aktif di Kabupaten Serang.



Ilustrasi; Kepala Desa Undar Andir ditangkap kasus narkoba. (dok)

Sekitar pukul 17.00 WIB, seorang pria berinisial DE diamankan petugas Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten di kawasan Pondok Cilegon Indah. Dari tangan pria tersebut, polisi menemukan 11,6 gram narkoba jenis sabu yang diduga akan diedarkan di wilayah Serang dan Cilegon.

Penangkapan DE tidak berhenti sebagai perkara satu orang. Penyidik kemudian membuka telepon seluler milik DE dan menemukan komunikasi dengan seseorang yang disebut berinisial K. Ia adalah Khusni Mubarak, Kepala Desa Undar Andir, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang.

Dari komunikasi tersebut, polisi melakukan pengembangan. DE kemudian diarahkan kembali berkomunikasi dengan Khusni untuk mengatur pertemuan. Lokasi yang disepakati berada di sekitar Alun-alun Kramatwatu. Khusni datang, sekitar pukul 18.47 WIB, petugas langsung mengamatkannya di area parkir sebuah minimarket dekat Alun-alun Kramatwatu.

"Pada saat dia datang, langsung kita amankan," ujar Kasubdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten AKBP Andie Firmansyah. Dari titik itu, sebuah perkara narkoba tidak lagi hanya berbicara mengenai pengungkapan sabu dan jaringan peredarannya. Kasus tersebut mulai menyentuh persoalan yang jauh lebih luas: bagaimana ketika seorang pejabat publik aktif terseret dalam perkara narkoba?

Sebab Khusni bukan warga biasa. Ia adalah kepala desa definitif yang masih memegang jabatan dan memiliki tanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan di Desa Undar Andir

Saat dilakukan penggeledahan, polisi tidak menemukan narkoba dari tangan Khusni. Namun hasil pemeriksaan berikutnya menunjukkan fakta berbeda. Hasil tes urine menyatakan Khusni positif mengandung amfetamin. Kepolisian menyebut Khusni sebagai pengguna sabu. "Pengguna sabu, hasil urine positif. Saat ini sudah kami titipkan di panti rehabilitasi," kata Andie.

Dalam pemeriksaan penyidik, Khusni juga disebut mengakui pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak 2022. Polisi menyebut penggunaan tersebut tidak terjadi hanya sekali. "Sejak tahun 2022, sudah lima kali," ujar Andie.

Kasus yang menyeret Khusni sendiri merupakan bagian dari pengembangan operasi narkoba yang lebih besar. Setelah penangkapan DE dan Khusni, polisi kembali melakukan pengembangan dan mengamankan seorang pria berinisial RA yang disebut sebagai rekan DE. RA ditangkap di sebuah tempat biliar di wilayah Kramatwatu.

Dari pengembangan terhadap RA, polisi menemukan puluhan paket sabu yang belum sempat diedarkan. Awalnya petugas menemukan tujuh paket di satu lokasi. Pengembangan kemudian dilakukan ke sebuah kontrakan di Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu.

Total terdapat 63 paket sabu yang diamankan. "Awalnya tujuh paket di lokasi pertama, kemudian dikembangkan di kontrakan RA di Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu. Totalnya ada 63 paket yang diamankan," kata Andie.

Polisi kemudian melakukan proses hukum terhadap DE dan RA.

Sementara Khusni menjalani rehabilitasi karena tidak ditemukan barang bukti narkoba saat dirinya diamankan, meskipun hasil pemeriksaan urine menunjukkan positif. Penyidikan terhadap jaringan tersebut juga belum berhenti. Polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu pihak yang diduga menjadi pemasok narkoba.

"Masih dikembangkan, asalnya dari Jakarta," ujar Andie. Sementara Kepala DMPD Kabupaten Serang Rudi Suhartanto mengatakan apabila kepala desa definitif masih memiliki status jabatan tetapi sedang menjalani cuti, mekanisme yang digunakan adalah pelaksana harian (PLH), bukan pelaksana tugas (PLT).

"Mekanismenya, contoh misalnya ada pola yang lain, yang bersangkutan mengajukan cuti. Bisa cuti umrah, cuti haji boleh dan dia mengajukan cuti itu boleh dengan surat dari yang bersangkutan pengajuan cuti, maka Pak Camat boleh ngangkat PLH," kata Rudi.

Menurut dia, PLH bertugas menjalankan kegiatan pemerintahan sehari-hari selama kepala desa definitif masih memiliki jabatan. "PLH itu hanya melaksanakan harian. Nanti di surat administrasinya PLH kepala desa, baru tanda tangan dia. Tapi dengan SK kecamatan," ujarnya.

Rudi menegaskan, status PLT berbeda dengan PLH. Menurut dia, PLT dapat digunakan ketika kepala desa telah diberhentikan.

"Kalau PLT itu kalau diberhentikan. Baru bisa berlaku itu PLT namanya pelaksana tugas. Kalau PLH itu definitifnya masih ada," katanya. **(Pung/Red)**



Ketua DPD NasDem Banten, Wahidin Halim.

Kembali Dipercaya Nahkodai NasDem Banten

WH; Menang Gampang, Komitmen Susah

TOTAL BANTEN - Wahidin Halim kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Banten periode 2026–2031. Mantan Gubernur Banten itu kembali menakhodai partai setelah kepengurusan DPW NasDem Banten dilantik bersama sejumlah kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kabupaten/kota di Banten, Kamis (20/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut pria yang akrab disapa WH ini menilai membesarkan partai bukan semata soal memenangkan kontestasi politik. Tantangan yang lebih berat justru menjaga komitmen seluruh kader. “Kalau mau menjadi pemenang gampang, yang sulit itu komitmen,” ujar Wahidin.

Menurut dia, politik tidak semestinya selalu dipandang sebagai sesuatu yang rumit. Politik, kata Wahidin, harus dijalani dengan komitmen sekaligus dinikmati sebagai bagian dari pengabdian. “Politik harus dinikmati dengan senang hati sebagai anugerah. Delapan kabupaten kota sudah dilantik, tinggal satu yang belum,” kata Wahidin se usai pelantikan.

Wahidin juga meminta seluruh DPD NasDem di Banten memiliki kantor yang representatif. Keberadaan kantor dinilai penting sebagai pusat konsolidasi sekaligus ruang interaksi antara partai dan masyarakat. “Semua DPD harus memikirkan sentral perubahan melalui kantor DPD. Jangan seperti dulu, kantor DPD ada di hutan, di pelosok,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Wahidin juga menyampaikan sentilan politik kepada Gubernur Banten Andra Soni. Ia mengingatkan kader NasDem agar tidak kehilangan sikap politik setelah partai ikut berkontribusi dalam proses kemenangan pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah pada Pilgub Banten 2024.

Wahidin menegaskan, kader yang tidak lagi memiliki komitmen terhadap keputusan partai dapat diganti.

“Saya akan berhentikan dan ganti pengurus kalau tidak komitmen. Kalau sudah komitmen dia tidak akan susah karena sudah mengerti dengan komitmen,” katanya.

Ia bahkan menyebut NasDem tidak boleh kalah secara politik dari Partai Gerindra yang menjadi kendaraan politik Andra Soni.

“Kita jangan kalah sama Gerindra, walaupun dia gubernurnya. Sikap politik itu harus seperti itu, jangan mau kalah,” ujarnya. Wahidin juga meminta Wakil Ketua Umum DPP NasDem Saan Mustopa tidak ragu melakukan pergantian terhadap kader atau pengurus yang dianggap tidak menjalankan komitmen partai.

“Nanti kita minta Pak Saad, kalau mau ganti ya ganti saja. Bagi anggota partai yang tidak datang di hari Rabu Biru ini, tidak susah, tidak seperti birokrasi. Gampang, kalau ganti ya ganti saja,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan, komitmen harus menjadi bagian dari konsekuensi setiap kader yang menerima amanah partai.

Menurut dia, kader NasDem tidak cukup hanya menjalankan tugas organisasi, tetapi juga harus berjuang bersama untuk mengawal program yang berpihak kepada masyarakat. “Jadi bukan hanya sekadar, tetapi harus berjuang bersama untuk mewujudkan program atau kebijakan prioritas dari pemerintahan,” kata Saan. **(Eks)**



Sebar Diskon Pajak saat HUT RI

TOTAL BANTEN - Hadiah kemerdekaan kali ini bukan sekadar seremoni. Pemilik kendaraan bermotor di Banten mendapat kesempatan mengurangi beban pajak sekaligus menghapus denda tunggakan. Gubernur Banten Andra Soni meneken Keputusan Gubernur Banten Nomor 435 Tahun 2026 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Pembebasan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor.

Kebijakan tersebut mulai berlaku sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Selasa (18/8/2026). Ada tiga skema yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Banten. Pertama, pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 5 persen bagi wajib pajak. Insentif ini berlaku 18 Agustus hingga 31 Oktober 2026.

Kedua, diskon lebih besar diberikan bagi kendaraan yang masuk ke Banten dari luar daerah. Pengurangan pokok PKB mencapai 20 persen untuk kendaraan yang melakukan mutasi dari luar Provinsi Banten dan 40 persen untuk kendaraan atas nama perusahaan. Skema kedua tersebut berlaku hingga 23 Desember 2026. Kebijakan ini tidak hanya berbicara tentang keringanan bagi wajib pajak.

Di baliknya terdapat kepentingan fiskal daerah: menarik kendaraan yang selama ini digunakan atau beroperasi di Banten tetapi masih terdaftar di luar daerah agar masuk ke basis pajak Banten.

Ketiga, Pemprov Banten membebaskan denda PKB untuk periode 18 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Artinya, bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan, momentum HUT ke-81 RI menjadi kesempatan

untuk menyelesaikan kewajiban tanpa terbebani sanksi denda sesuai ketentuan program.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan.

"Salah satu upaya yang selalu kita lakukan setiap tahunnya dalam rangka memperingati HUT RI dan juga menjelang ulang tahun Provinsi Banten, kita selalu memberikan beberapa program bagi masyarakat, salah satunya adalah kaitan dengan insentif pajak yang diberikan kepada masyarakat," kata Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Minggu (16/8/2026) malam.

Pemprov Banten menyebut kebijakan tersebut dirancang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan asas keadilan. Namun, insentif ini juga memiliki kepentingan lain. Pemerintah daerah berharap keringanan tersebut dapat menekan tunggakan, meningkatkan kepatuhan, sekaligus memperluas basis wajib pajak.

Khusus kendaraan dari luar daerah, pemerintah bahkan memberikan insentif lebih besar. Langkah tersebut menjadi upaya menarik potensi penerimaan yang selama ini belum masuk ke kas daerah Banten. Dengan demikian, diskon pajak menjadi dua sisi kebijakan. Di satu sisi masyarakat memperoleh keringanan. Di sisi lain, Pemprov Banten berharap semakin banyak kendaraan yang tercatat dan membayar pajak di Banten.

Program pembebasan denda juga diarahkan untuk mengurangi jumlah kendaraan yang memiliki tunggakan.

Andra Soni menegaskan masyarakat sebaiknya memanfaatkan kesempatan tersebut dan tidak menunggu program serupa pada tahun berikutnya.

"Program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor," katanya.

Pemprov Banten juga mengingatkan bahwa insentif tersebut merupakan stimulus, bukan alasan untuk kembali menunda pembayaran pajak.

Setelah masa insentif berakhir, pemerintah berharap kepatuhan pembayaran PKB berlanjut secara normal.

Plt Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Bappenda Provinsi Banten, Bambang Dwi Janarko, mengatakan diskon diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan maupun denda. "Di tahun ini Pemerintah Provinsi Banten sedang mengeluarkan kebijakan terkait dengan diskon pajak. Ada diskon 5 persen untuk masyarakat yang patuh pajak," kata Bambang saat ditemui di kantornya, Kamis (27/8/2026).

Menurutnya, kategori masyarakat yang dinilai patuh adalah wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan dan denda. Insentif tersebut diberikan pada pokok PKB. "Patuh pajak artinya masyarakat yang tidak punya tunggakan atau tidak punya denda. Itu kita berikan diskon 5 persen pokok pajak kendaraan bermotor," ujarnya. **(Dir/Red)**



Dampak Pendapatan Jeblok Tunjangan Kinerja ASN Pemprov Banten Dipangkas

TOTAL BANTEN - Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan APBD 2026. Penurunan terutama terlihat pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya sektor pajak daerah.

Dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, pendapatan daerah Banten diproyeksikan sebesar Rp9,33 triliun. Angka tersebut lebih rendah sekitar Rp751,15 miliar dibandingkan APBD Banten 2026 yang mencapai Rp10,08 triliun.

Penyusutan terbesar berasal dari PAD. Pada APBD 2026, PAD Banten ditargetkan sebesar Rp7,49 triliun. Sementara dalam proyeksi APBD 2027, nilainya menjadi sekitar Rp6,77 triliun atau berkurang sekitar Rp725,60 miliar.

Di tengah penyesuaian struktur APBD tersebut, Pemerintah Provinsi Banten juga menyiapkan opsi penyesuaian tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara (ASN). Sekretaris Daerah Banten Deden Apriandhi mengatakan pengurangan tunjangan kinerja menjadi salah satu usulan dalam penyusunan struktur APBD 2027.

Kebijakan tersebut berkaitan dengan kebutuhan anggaran untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. "Rancangan struktur untuk 2027 itu tetap masih memperhitungkan gaji dan tunjangan untuk semua PPPK yang ada di Provinsi Banten," ujar Deden, Kamis (13/8/2026).

Menurut Deden, pemerintah daerah tetap mempertahankan seluruh PPPK. Dalam penyusunan anggaran, kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan PPPK diperhitungkan bersama dengan penyesuaian sejumlah komponen belanja lainnya.

Salah satu opsi yang diusulkan adalah penyesuaian tunjangan kinerja ASN.

"Walaupun kita mengurangi tunjangan kinerja bagi para PNS yang lain," katanya. Namun, pemerintah daerah belum menetapkan besaran pengurangan tunjangan kinerja tersebut.

Deden mengatakan keputusan mengenai kebijakan tukin masih menunggu pembahasan lebih lanjut dalam penyusunan KUA-PPAS dan APBD 2027. "Ya kepastiannya nanti pada saat KUA-PPAS. Ini belum. Yang kita usulkan kemarin termasuk di antaranya pengurangan tunjangan kinerja," ujarnya.

Besaran tunjangan kinerja ASN Pemprov Banten saat ini berbeda sesuai kelas jabatan dan posisi. Untuk jabatan Sekretaris Daerah, tukin berada di kisaran Rp76,5 juta per bulan. Jabatan pimpinan tinggi pratama seperti asisten daerah, kepala dinas, kepala badan, inspektur dan sekretaris DPRD berada di kisaran Rp55 juta per bulan.

Kepala Satpol PP dan kepala pelaksana BPBD memperoleh tukin sekitar Rp45 juta hingga Rp47 juta. Sementara staf ahli gubernur, kepala biro dan direktur utama rumah sakit umum daerah berada di kisaran Rp35 juta hingga Rp40 juta. Pada tingkat jabatan administrator, tukin berada di kisaran Rp26 juta hingga

Rp30 juta per bulan. Jabatan pengawas berada di kisaran Rp10 juta hingga Rp20 juta. Sementara jabatan fungsional dan pelaksana memperoleh tunjangan kinerja dengan nominal sekitar Rp5 juta hingga Rp29,5 juta, bergantung pada kelas jabatan dan posisi.

Penyesuaian tukin, apabila diterapkan, akan menjadi bagian dari struktur belanja pegawai dalam APBD 2027. Pemerintah Provinsi Banten hingga kini belum menyampaikan besaran maupun skema pengurangan yang akan diterapkan.

Di sisi lain, Pemprov Banten memastikan tidak akan melakukan pengurangan jumlah PPPK.

Deden meminta para PPPK tetap menjalankan tugasnya dan tidak mencemaskan keberlanjutan pekerjaan. "Yang penting tinggal kerjanya, tinggal motivasinya. Karena semua juga berkontribusi untuk keberadaan teman-teman PPPK," katanya.

Gubernur Banten Andra Soni juga menegaskan Pemerintah Provinsi Banten tidak akan mengurangi jumlah PPPK. Pemerintah daerah, kata dia, sedang menghitung kemampuan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembayaran pegawai.

"Kita enggak melakukan pengurangan. Saya pastikan para P3K ini tetap bekerja, karena keberhasilan membangun di Banten selama ini berkat jasa rekan-rekan P3K," ujar Andra. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Banten bersama DPRD Banten telah menyepakati KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Situ Rawa Enang “Dikuasai” Pihak Lain

DPUPR Banten dan Kejati Kerjasama



Jalan Raya Bojonegara-Puloampel

TOTAL BANTEN - Situ Rawa Enang, aset yang disebut telah dilimpahkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Provinsi Banten pascapemekaran wilayah, kini masih menghadapi persoalan penguasaan lahan. Pemerintah Provinsi Banten bahkan menemukan adanya bangunan di kawasan yang tengah diproses untuk mendapatkan kepastian status sertifikat tersebut.

Untuk mengamankan aset tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dalam proses sertifikasi Situ Rawa Enang di Desa Kemuning, Kecamatan Tunjungteja, Kabupaten Serang.

Pemprov Banten menyatakan akan melakukan penertiban apabila hasil verifikasi menunjukkan bangunan yang berada di kawasan tersebut berdiri di atas tanah milik pemerintah daerah. Kepala DPUPR Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan pemerintah tidak akan mengambil tindakan sebelum

memastikan secara administratif dan fisik batas-batas aset yang sedang disertifikasi. "Kalau ada bangunan di atasnya akan kita ratakan. Pasti kita lakukan itu. Tetapi sekarang kita pastikan dulu lokasinya sesuai atau tidak. Kalau memang terbukti, ya kita tindak tegas," kata Arlan di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (5/8/2026).

Saat ini, DPUPR Provinsi Banten tengah menyelesaikan proses sertifikasi Situ Rawa Enang dengan luas sekitar 10 hektare. Proses tersebut telah memasuki tahap splitsing atau pemisahan berkas sertifikat tanah. Proses sertifikasi dilakukan untuk memastikan batas dan status kepemilikan aset sebelum dilakukan pencatatan sebagai aset Pemerintah Provinsi Banten.

Situ Rawa Enang merupakan salah satu aset yang dilimpahkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemprov Banten setelah pembentukan Provinsi Banten. Namun, aset tersebut sebelumnya sempat menghadapi persoalan status karena pernah diklaim sebagai milik PT Sasmita Jaya Perkasa.

Persoalan aset tidak hanya terjadi di Situ Rawa Enang. Pemprov Banten juga sedang menangani Situ Pasaraut dengan luas sekitar 20 hektare. Kedua aset tersebut kini berada dalam proses penyelesaian sertifikasi dan pengamanan. Pemerintah berencana melakukan identifikasi terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan status penguasaan lahan tersebut.

Arlan mengatakan proses sertifikasi Situ Rawa Enang dan Situ Pasaraut mendapat pendampingan dari Kejati Banten. Pendampingan dilakukan setelah DPUPR mengajukan permohonan untuk membantu percepatan proses pengamanan aset. "Untuk Situ Rawa Enang dan Pasaraut, sekarang kami mengajukan permohonan pendampingan kepada Kejati Banten supaya percepatan dalam konteks pengamanan aset," ujarnya.

Menurut Arlan, keterlibatan Kejati Banten tidak berkaitan dengan adanya kesimpulan mengenai dugaan pelanggaran dalam persoalan aset tersebut. **(Eks/Red)**

Proyek di Kabupaten Serang Berpotensi Mandek KUA PPAS APBD Perubahan Belum Disahkan



Kantor BPKAD Kabupaten Serang

TOTAL BANTEN - Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Kabupaten Serang 2026 telah rampung. Namun, hingga Sabtu (15/8/2026), rancangan tersebut belum kunjung disahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Serang Beni Rahmatullah Sandjadirdja mengatakan, rancangan KUA-PPAS mulai disusun setelah RKPD Perubahan 2026 ditetapkan Bapperida pada 5 Agustus. "Kita sudah menyampaikan KUA-PPAS Perubahan ke DPRD tanggal 10 Agustus, dilanjutkan dengan pembahasan dengan Banggar tanggal 11 Agustus," kata Beni, Sabtu (15/8/2026).

Dalam pembahasan tersebut, nilai rancangan APBD Perubahan meningkat dari sekitar Rp3,2 triliun menjadi Rp3,4 triliun.

Tambahan anggaran berasal antara lain dari realisasi kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat. Dari tambahan sekitar Rp53 miliar, sekitar Rp42 miliar telah diarahkan untuk program prioritas Bapperida. Sementara sekitar Rp10-11 miliar dialokasikan untuk sejumlah program tambahan.

Di antaranya sekitar Rp7 miliar untuk program prioritas Bupati yang diarahkan mendukung Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Cilowong, Rp1 miliar untuk rangkaian kegiatan 500 tahun Kabupaten Serang, serta sekitar Rp2 miliar untuk tambahan penyertaan modal PDAM. Beni mengatakan rincian program tersebut masih dalam proses pembahasan. "Di KUA-PPAS ini antara pendapatan dan belanja sudah kita plotkan lagi menjadi nol SiLPA-nya," ujarnya. Meski pembahasan telah dilakukan sejak 11 Agustus, hingga kini pengesahan KUA-PPAS APBD Perubahan Kabupaten Serang belum dilakukan.





Tebing Koja

Kawasan wisata alam Tebing Koja, yang juga dikenal dengan sebutan Kandang Godzilla, menawarkan lanskap unik yang sulit ditemukan di tempat lain di Tangerang. Deretan tebing batu yang menjulang kokoh berpadu dengan hamparan pepohonan hijau, menciptakan panorama alam yang memanjakan mata.

Dari puncak hingga kaki tebing, pengunjung akan disuguhi pemandangan dinding batu hasil proses alam yang membentuk lekukan-lekukan eksotis. Keindahan tersebut semakin lengkap dengan aliran sungai yang berkelok di antara kawasan tebing serta hamparan sawah hijau yang membentang di sekitarnya.

Pesona alam yang masih asri menjadikan Tebing Koja sebagai salah satu destinasi favorit para pencinta fotografi.

Berbagai sudut kawasan ini kerap dimanfaatkan sebagai lokasi berburu foto, mulai dari foto prewedding, konten media sosial, hingga sekadar mengabadikan momen liburan bersama keluarga dan sahabat.

Saat pagi atau menjelang senja, panorama Tebing Koja terlihat semakin menawan. Cahaya matahari yang menyinari dinding-dinding batu menciptakan gradasi warna yang dramatis, menghadirkan suasana tenang sekaligus memukau bagi setiap pengunjung yang datang.

Telaga Biru Cisoka

Telaga Biru Cisoka menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian di Kabupaten Tangerang. Sesuai namanya, tempat ini menawarkan pemandangan telaga dengan gradasi warna biru yang memikat, berpadu dengan suasana tenang yang cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari.

Air telaga yang terlihat jernih dengan warna khasnya menciptakan panorama yang memanjakan mata. Di sekeliling kawasan, pengunjung dapat menikmati udara segar sambil berjalan santai, berolahraga ringan, atau sekadar duduk menikmati keindahan alam yang tersaji.

Keunikan warna air dan lanskap di sekitarnya menjadikan Telaga Biru Cisoka sebagai salah satu lokasi favorit untuk berburu foto. Berbagai sudut telaga menawarkan latar yang menarik bagi pengunjung yang ingin mengabadikan momen bersama keluarga, sahabat, maupun untuk kebutuhan konten media sosial.





Scientia Square Park

Scientia Square Park (SQP) menjadi salah satu destinasi wisata keluarga yang menawarkan perpaduan antara rekreasi dan edukasi di Tangerang. Kawasan ini dirancang sebagai ruang terbuka yang ramah anak, dengan beragam aktivitas interaktif yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendukung perkembangan motorik, kreativitas, dan kemampuan kognitif.

Di dalam area taman, anak-anak dapat mencoba berbagai wahana edukatif yang mengajak mereka belajar sambil bermain. Mulai dari merasakan pengalaman bermain di area persawahan, menjelajahi jalur bike trail, menantang adrenalin di wahana wall climbing, hingga berinteraksi dengan alam melalui berbagai aktivitas luar ruangan lainnya.

Hamparan ruang hijau yang luas membuat suasana di Scientia Square Park terasa nyaman untuk keluarga. Orang tua dapat mengawasi anak-anak bermain sambil menikmati udara segar dan lingkungan yang tertata rapi. Beragam fasilitas yang tersedia juga menjadikan kawasan ini cocok sebagai pilihan rekreasi akhir pekan maupun destinasi liburan sekolah.

Scientia Square Park

Branchsto Equestrian Park menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dibandingkan destinasi rekreasi pada umumnya. Di tempat ini, pengunjung dapat merasakan sensasi menunggang kuda di area yang dirancang menyerupai kawasan peternakan modern, menjadikannya pilihan menarik untuk liburan keluarga maupun aktivitas bersama teman.

Salah satu daya tarik utama Branchsto adalah kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan kuda, mulai dari berkuda santai hingga mengenal lebih dekat dunia equestrian. Bagi pengunjung yang menyukai aktivitas luar ruang, tersedia pula wahana ATV yang memungkinkan mereka menjelajahi area wisata dengan pengalaman yang lebih menantang. Tak hanya menawarkan aktivitas rekreasi, Branchsto Equestrian Park juga dilengkapi fasilitas kuliner yang dapat menjadi tempat beristirahat setelah berkeliling. Beragam hidangan tersedia, mulai dari menu khas Nusantara hingga sajian bergaya western yang dapat dinikmati bersama keluarga. Dengan konsep wisata edukasi, petualangan, dan kuliner dalam satu kawasan, Branchsto Equestrian Park menjadi salah satu destinasi favorit di Tangerang bagi pengunjung yang ingin menikmati pengalaman liburan yang lebih beragam.



#AnimalPark



Sate Bandeng

Sate bandeng bukan sekadar kuliner khas Banten, melainkan bagian dari warisan sejarah yang telah bertahan selama berabad-abad. Hidangan ini dipercaya sudah dikenal sejak masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, sultan pertama Kesultanan Banten, pada abad ke-16.

Berbeda dengan sate pada umumnya, sate bandeng diolah melalui proses yang cukup rumit. Daging ikan bandeng dipisahkan dari durinya, kemudian dihaluskan dan dicampur berbagai rempah khas sebelum dimasukkan kembali ke dalam kulit ikan. Setelah itu, bandeng dibakar hingga menghasilkan aroma yang menggugah selera.

Rabeg

Di antara beragam kuliner tradisional Banten, rabeg menempati posisi istimewa sebagai hidangan yang kaya cita rasa dan sarat sejarah. Masakan ini berbahan dasar daging kambing atau sapi, lengkap dengan jeroannya, yang dimasak dalam kuah kental bercita rasa gurih, pedas, dan kaya rempah.

Keistimewaan rabeg terletak pada racikan bumbunya. Lada, jahe, bawang merah, kayu manis, serta berbagai rempah pilihan lainnya berpadu menghasilkan aroma yang kuat dan menggugah selera. Proses memasak yang dilakukan dalam waktu cukup lama membuat bumbu meresap sempurna ke dalam daging sehingga menghasilkan tekstur yang empuk dan rasa yang khas.

Kuliner ini diyakini memiliki pengaruh dari tradisi kuliner Timur Tengah yang masuk ke Banten melalui jalur perdagangan dan penyebaran Islam pada masa Kesultanan Banten. Seiring waktu, masyarakat lokal mengadaptasinya dengan menambahkan kekayaan rempah Nusantara sehingga melahirkan cita rasa rabeg yang dikenal hingga saat ini.

Kini, rabeg menjadi salah satu hidangan khas yang banyak dicari wisatawan saat berkunjung ke Banten. Disajikan hangat bersama nasi putih, rabeg menawarkan perpaduan rasa gurih, manis, dan pedas yang mencerminkan kekayaan budaya kuliner masyarakat Banten dari masa ke masa.





Angeun lada merupakan salah satu kuliner tradisional khas Banten yang terkenal dengan cita rasa pedas dan kaya rempah. Hidangan berkuah ini biasanya berisi potongan daging sapi serta aneka jeroan, seperti jantung, limpa, babat, dan usus, yang dimasak hingga empuk dalam kuah berbumbu kuat. Nama "angeun lada" berasal dari bahasa Sunda Banten, yang secara harfiah berarti sayur atau kuah lada. Sesuai namanya, lada menjadi salah satu bumbu utama yang memberikan sensasi hangat dan rasa pedas yang khas. Beragam rempah lainnya turut ditambahkan sehingga menghasilkan kuah yang gurih dengan aroma yang menggugah selera.

Di masyarakat Banten, angeun lada kerap hadir dalam berbagai acara keluarga, perayaan adat, hingga momen hari besar keagamaan. Hidangan ini tidak hanya menjadi sajian kuliner, tetapi juga bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Saat disantap hangat bersama nasi putih, angeun lada menawarkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan rempah yang kuat. Sensasi hangat dari kuahnya membuat makanan ini sangat cocok dinikmati saat cuaca dingin atau ketika berkumpul bersama keluarga. Sebagai salah satu warisan kuliner khas Tanah Jawa, angeun lada menjadi bukti kekayaan tradisi memasak masyarakat Banten yang mampu memadukan bahan sederhana dengan rempah-rempah Nusantara menjadi hidangan bercita rasa istimewa.

Angeun Lada



BOX Redaksi

Pimpinan Perusahaan : Engkos Kosasih, **Pemimpin Redaksi:** Andre SN, **Redaktur Pelaksana :** Agus Lani **Redaktur :** Imam Maulana, Hasanudin, Fariz, **Reporter :** D. Amanda, Saepul Aripin (Ipung), Dirhat, Andre Sopian, Abdul Majid, Muhammad Lutfi, Bandi Subandi, **Desain Grafis :** PT Banten Media Network

Penerbit : PT Raya Media Investama

Bisnis : Mahkota Royal Energi

Komplek Perumahan Citra Gading Blok Q4 nomor 3, Kelurahan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten

Kontak : Tlp/WA : 087854473555/ Email : totalbanten@gmail.com



Alih Fungsi Lahan Nyata Pemkot Serang Abaikan Kajian Cadangan Air Tanah

TOTAL BANTEN - Ratusan warga di Kota Serang kini kesulitan mendapatkan air bersih setelah sumur-sumur mereka mengering selama musim kemarau. Berdasarkan penelusuran Total Banten, kawasan Kasemen dan Walantaka menjadi dua wilayah dengan pertumbuhan perumahan yang cukup pesat. Di saat yang sama, warga di sejumlah titik mulai mengeluhkan debit air sumur yang terus menurun.

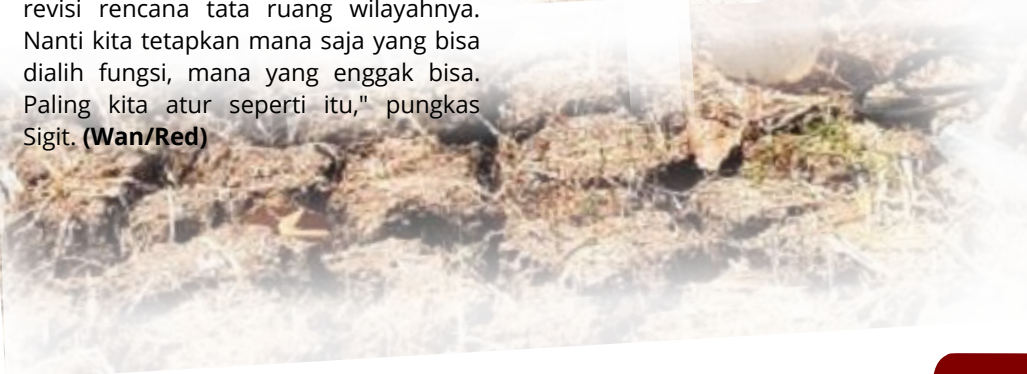
Di tengah masifnya pembangunan kawasan perumahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Serang justru mengakui belum memiliki kajian ilmiah mengenai daya dukung cadangan air tanah sebagai dasar penataan ruang. Secara hidrologis, berkurangnya lahan terbuka dan kawasan resapan dapat mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan.

Air yang seharusnya meresap untuk mengisi cadangan air bawah tanah (akuifer) lebih banyak berubah menjadi limpasan permukaan. Namun, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Serang, Sigit Julian, mengaku pihaknya belum memiliki kajian mengenai batas kemampuan cadangan air tanah maupun daya dukung lingkungan sebagai dasar penataan ruang kawasan perumahan.

"Kalau itu saya enggak bisa secara ilmiah menjelaskan, apalagi menjelaskan ambang batas. Saya enggak tahu. Karena cadangan air tanah pun saya enggak tahu," kata Sigit, Senin (27/7/2026).

Pemerintah Kota Serang juga belum memiliki peta kajian dalam menentukan kawasan yang dapat dialihfungsikan menjadi permukiman. Meski demikian, Sigit mengatakan Dinas PUPR tetap melakukan penindakan apabila menemukan pengembang yang melanggar ketentuan. "Sudah ada tindakan juga dari kita untuk pelanggaran," ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Serang saat ini sedang merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menentukan kawasan yang dapat dan tidak dapat dialihfungsikan. "Kita sedang revisi rencana tata ruang wilayahnya. Nanti kita tetapkan mana saja yang bisa dialih fungsi, mana yang enggak bisa. Paling kita atur seperti itu," pungkas Sigit. **(Wan/Red)**



Paradoks Banten

Industri Numpuk, Kemiskinan Tinggi, Fiskal Melemah

Penulis : Founder Total Banten, Engkos Kosasih

TOTAL BANTEN - Banten menyimpan sebuah paradoks pembangunan yang tidak bisa dibaca hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi. Provinsi ini berada di salah satu simpul ekonomi nasional, memiliki kawasan industri besar, menjadi pintu masuk perdagangan Pulau Jawa dan berada di sekitar pusat ekonomi Jakarta. Aktivitas manufaktur berkembang dari skala mikro hingga industri besar, sementara investasi dan pembangunan infrastruktur terus bergerak.

Basis industrinya pun tidak kecil. Data Badan Pusat Statistik mencatat sedikitnya 99.726 usaha industri mikro dan kecil berada di Banten. Jumlah tersebut terdiri dari 93.834 industri mikro dan 5.892 industri kecil. Angka itu belum memasukkan industri menengah dan besar yang terkonsentrasi di sejumlah kawasan industri di Tangerang Raya, Serang dan Cilegon. Dengan basis industri sebesar itu, Banten sesungguhnya bukan daerah yang kekurangan aktivitas ekonomi.

Namun geliat industri tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan hilangnya kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pada September 2025 jumlah penduduk miskin di Banten masih mencapai 760,85 ribu orang atau 5,51 persen dari total penduduk. Angka tersebut memang menurun dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan itu patut dicatat sebagai perkembangan positif.

Namun, angka statistik tidak boleh menutupi kenyataan bahwa lebih dari tiga perempat juta warga masih hidup di bawah garis kemiskinan. Di sinilah pembangunan Banten perlu dibaca secara lebih kritis. Pertumbuhan ekonomi dan banyaknya aktivitas industri tidak otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan. Industri dapat tumbuh, investasi dapat masuk dan produksi dapat meningkat, tetapi manfaat ekonomi tidak selalu mengalir secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Data kemiskinan BPS juga memperlihatkan persoalan lain. Pada September 2025, tingkat kemiskinan di perkotaan tercatat 5,35 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 6,27 persen. Ketika kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan, persentase kemiskinan di perdesaan justru meningkat dibandingkan Maret 2025.

Artinya, penurunan angka kemiskinan secara agregat belum tentu menggambarkan perbaikan yang sama di seluruh wilayah. Banten masih menghadapi perbedaan karakter pembangunan antara kawasan industri dan perkotaan dengan wilayah perdesaan yang sebagian ekonominya masih bergantung pada sektor pertanian, perikanan dan aktivitas ekonomi berproduktivitas rendah. Kondisi tersebut seharusnya menjadi dasar dalam membaca kebijakan anggaran daerah.

Sebab, di tengah potensi industri yang besar, kemampuan pemerintah mengatasi kemiskinan sangat ditentukan oleh bagaimana sumber daya publik digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada 2025, Pemerintah Provinsi Banten masih memiliki ruang fiskal yang relatif besar.

Pendapatan daerah dalam APBD 2025 ditetapkan sekitar Rp11,83 triliun dengan belanja sekitar Rp11,84 triliun. Postur tersebut menunjukkan kapasitas pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik dan program pembangunan dalam skala besar.

Namun, besarnya anggaran tidak dengan sendirinya menjamin perubahan sosial. APBD hanya menjadi angka di atas dokumen apabila tidak memiliki hubungan yang jelas dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks kemiskinan, yang harus dilihat bukan hanya berapa besar anggaran bantuan sosial. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dibebankan kepada satu jenis belanja atau satu organisasi perangkat daerah. Kemiskinan memiliki akar yang lebih kompleks, mulai dari rendahnya pendidikan, terbatasnya akses pekerjaan, produktivitas ekonomi yang rendah, ketimpangan akses pelayanan dasar hingga kerentanan rumah tangga menghadapi tekanan ekonomi.

Karena itu, APBD seharusnya bekerja secara lintas sektor. Anggaran pendidikan harus membantu memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Anggaran kesehatan harus mencegah keluarga jatuh miskin akibat beban pengobatan. Belanja infrastruktur harus membuka akses terhadap pusat ekonomi. Program ketenagakerjaan harus mempertemukan

keterampilan masyarakat dengan kebutuhan dunia kerja. Sementara belanja pertanian, perikanan dan pemberdayaan usaha harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Di tengah basis industri yang besar, persoalan ketenagakerjaan menjadi salah satu titik yang harus mendapat perhatian. Banten tidak cukup hanya membangun atau menarik industri. Pertanyaan yang lebih penting adalah sejauh mana industri tersebut membuka mobilitas ekonomi bagi masyarakat lokal.

Apakah tenaga kerja Banten memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri? Apakah lulusan sekolah dan perguruan tinggi dapat terserap oleh dunia kerja? Apakah industri besar menciptakan rantai pasok yang dapat dimasuki UMKM lokal? Ataupun pertumbuhan industri justru berjalan dalam ekosistem yang terpisah dari masyarakat di sekitarnya?

Persoalan inilah yang membuat jumlah industri tidak dapat langsung diterjemahkan sebagai ukuran kesejahteraan. Industri dapat tumbuh, tetapi jika penyerapan tenaga kerja tidak optimal dan nilai tambah ekonomi tidak berputar di tingkat lokal, maka pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada pusat-pusat tertentu. Di sinilah APBD memiliki fungsi yang tidak dapat digantikan oleh investasi swasta. Pemerintah memang tidak dapat mengendalikan seluruh keputusan bisnis, tetapi pemerintah dapat menggunakan anggaran publik untuk mempersiapkan masyarakat agar mampu masuk ke dalam arus pertumbuhan. Pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri. Infrastruktur dapat membuka akses ekonomi. Program pemberdayaan dapat meningkatkan kapasitas usaha kecil. Sementara perlindungan sosial dapat menjaga kelompok rentan agar tidak semakin terpuruk ketika menghadapi tekanan ekonomi.

Persoalannya kemudian bukan hanya berapa besar APBD, tetapi bagaimana kualitas belanjanya. Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika Banten memasuki tahun anggaran 2026 dengan ruang fiskal yang lebih terbatas.

Dinamika APBD Banten

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika Banten memasuki tahun anggaran 2026 dengan ruang fiskal yang lebih terbatas. Dalam APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp10,08 triliun, lebih rendah dibandingkan postur APBD 2025. PAD menjadi sumber utama pendapatan dengan target Rp7,49 triliun. Dari jumlah tersebut, pajak daerah menjadi penyumbang terbesar sebesar Rp6,81 triliun, sedangkan pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp2,58 triliun.

Belanja daerah pada APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp10,04 triliun. Belanja operasi mengambil porsi terbesar sebesar Rp7,22 triliun. Di dalamnya terdapat belanja barang dan jasa Rp3,47 triliun. Belanja modal dialokasikan Rp804,09 miliar, belanja hibah Rp620,75 miliar dan belanja bantuan sosial Rp18,61 miliar. Selain itu, belanja transfer mencapai Rp1,96 triliun.

Struktur tersebut menunjukkan bahwa perubahan kapasitas fiskal mulai menjadi tantangan bagi Banten. Ketika pendapatan daerah mengalami penurunan, pemerintah tidak lagi memiliki ruang yang sama untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Dalam situasi seperti itu, kualitas perencanaan menjadi jauh lebih penting daripada sekadar besarnya anggaran.

Pemerintah harus mampu membedakan antara belanja yang bersifat rutin dengan belanja yang benar-benar menghasilkan dampak.

Efisiensi anggaran tidak cukup dilakukan dengan memangkas angka. Yang lebih penting adalah memastikan uang yang tersedia diarahkan kepada program yang memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat. Kemiskinan seharusnya menjadi salah satu ukuran dalam menentukan prioritas tersebut.

Dengan jumlah penduduk miskin mencapai 760,85 ribu orang, setiap kebijakan anggaran perlu memiliki hubungan yang jelas dengan upaya memperluas kesempatan ekonomi dan mengurangi kerentanan masyarakat. Tidak semua program harus diberi label penanggulangan kemiskinan, tetapi setiap belanja pembangunan harus dapat diuji dampaknya terhadap kesejahteraan.

Di sinilah kelemahan klasik pengelolaan anggaran pemerintah sering muncul. Keberhasilan masih terlalu sering diukur berdasarkan serapan anggaran dan penyelesaian kegiatan. Padahal serapan hanya menunjukkan bahwa uang telah dibelanjakan. Kegiatan yang selesai hanya menunjukkan program telah dilaksanakan. Keduanya belum menjawab apakah kehidupan masyarakat berubah.

Pelatihan kerja, misalnya, tidak cukup dinilai dari jumlah peserta. Ukuran yang lebih penting adalah berapa peserta yang memperoleh pekerjaan. Bantuan kepada pelaku usaha tidak cukup diukur dari jumlah penerima, tetapi apakah pendapatan dan produktivitas mereka meningkat. Pembangunan infrastruktur juga tidak cukup diukur berdasarkan volume pekerjaan, melainkan dampaknya terhadap akses dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Perubahan cara pandang inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam menyusun anggaran berikutnya. Banten kini memasuki tahapan penyusunan APBD 2027 melalui KUA-PPAS. Dokumen tersebut menjadi penting karena disusun ketika ruang fiskal kembali menghadapi tekanan. Proyeksi pendapatan daerah dalam KUA-PPAS 2027 berada di kisaran Rp9,33 triliun atau turun sekitar Rp751,15 miliar dibandingkan target pendapatan APBD 2026 sebesar Rp10,08 triliun.

Jika dibandingkan secara berurutan, kapasitas pendapatan Banten menunjukkan tren penurunan. Dari sekitar Rp11,83 triliun dalam APBD 2025, turun menjadi Rp10,08 triliun pada APBD 2026, kemudian diproyeksikan kembali turun menjadi sekitar Rp9,33 triliun dalam KUA-PPAS 2027. Tren tersebut harus menjadi perhatian serius. Penurunan ruang fiskal berarti pemerintah harus semakin ketat menentukan prioritas. Tidak seluruh keinginan pembangunan dapat dibiayai dalam waktu bersamaan. Pemerintah harus memilih program yang paling relevan, menghentikan kegiatan yang tidak efektif dan memastikan anggaran yang terbatas menghasilkan dampak yang terukur. Dalam KUA-PPAS 2027, Pemerintah Provinsi Banten mengarahkan pembangunan pada

peningkatan daya saing sumber daya manusia yang berintegritas serta integrasi ekonomi domestik dan global. Arah tersebut memiliki relevansi kuat dengan persoalan kemiskinan. Namun keberhasilannya bergantung pada bagaimana tema tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran. Peningkatan daya saing sumber daya manusia tidak boleh hanya menjadi program bagi kelompok yang sejak awal telah memiliki akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja. Kelompok miskin dan rentan harus menjadi bagian dari agenda tersebut.

Sebab ketimpangan ekonomi sering kali berawal dari ketimpangan kesempatan. Anak dari keluarga miskin memiliki risiko lebih besar memperoleh pendidikan yang terbatas. Pendidikan yang rendah berpengaruh terhadap keterampilan. Keterampilan yang terbatas mempersempit akses terhadap pekerjaan produktif. Pendapatan yang rendah kemudian diwariskan kembali dalam bentuk keterbatasan kesempatan bagi generasi berikutnya. Siklus tersebut tidak dapat diputus hanya melalui bantuan jangka pendek. Dibutuhkan investasi jangka panjang pada manusia melalui pendidikan, kesehatan, keterampilan dan akses terhadap pekerjaan.

Di sisi lain, integrasi ekonomi domestik dan global juga harus diterjemahkan secara inklusif. Banten tidak cukup hanya menjadi lokasi masuknya investasi. Masyarakat lokal harus memiliki kemampuan untuk mengambil bagian dalam pertumbuhan tersebut. Banten memiliki modal ekonomi untuk mempercepat pengurangan kemiskinan. Industri tumbuh dari skala mikro hingga manufaktur besar. Investasi terus bergerak. Posisi geografisnya strategis. Kapasitas ekonomi tersebut seharusnya menjadi modal untuk menciptakan mobilitas sosial yang lebih luas. Namun modal ekonomi membutuhkan kebijakan publik yang mampu menghubungkan pertumbuhan dengan kesejahteraan. Di titik inilah APBD memiliki peran yang menentukan. Anggaran publik harus menjadi alat untuk memastikan masyarakat yang tertinggal dapat masuk ke dalam arus pembangunan. (*)

“**POLEMIK ANGGARAN TENAGA AHLI RP 55,47 MILIAR untuk Honor Lembaga**”

Alokasi belanja Rp55,47 miliar untuk Tenaga Ahli tahun 2026, memantik perhatian. Bukan hanya terus mengalami kenaikan sejak 2024, tetapi rekrutmen tenaga ahli tak transparan hingga muncul dugaan diisi oleh mantan timses Andra-Dimiyati hingga orang-orang terdekat mereka.

